

# mediabpp

JENDELA INFORMASI KELITBANGAN

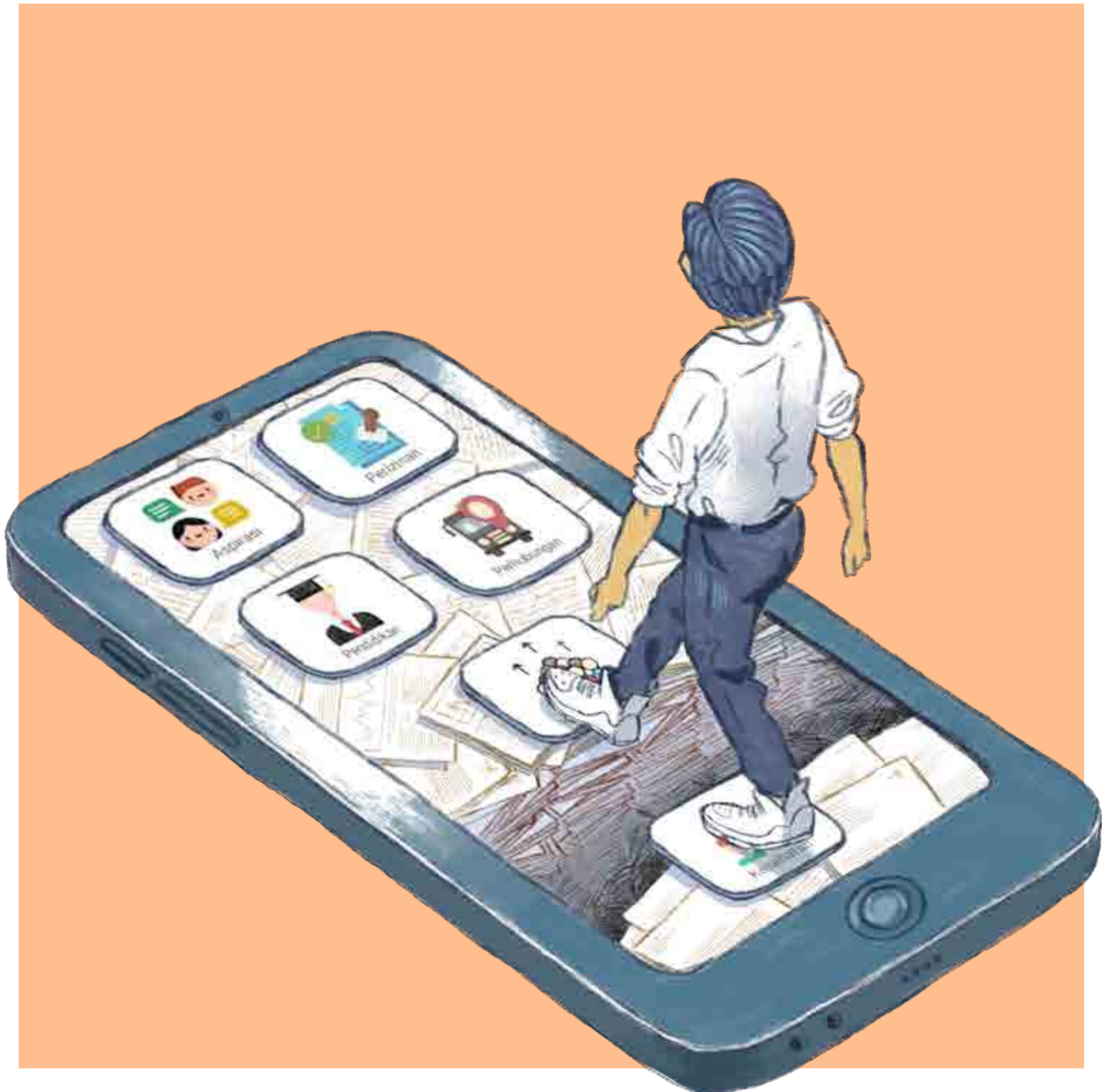


MERAJUT INOVASI DAERAH DENGAN PUJA INDAH

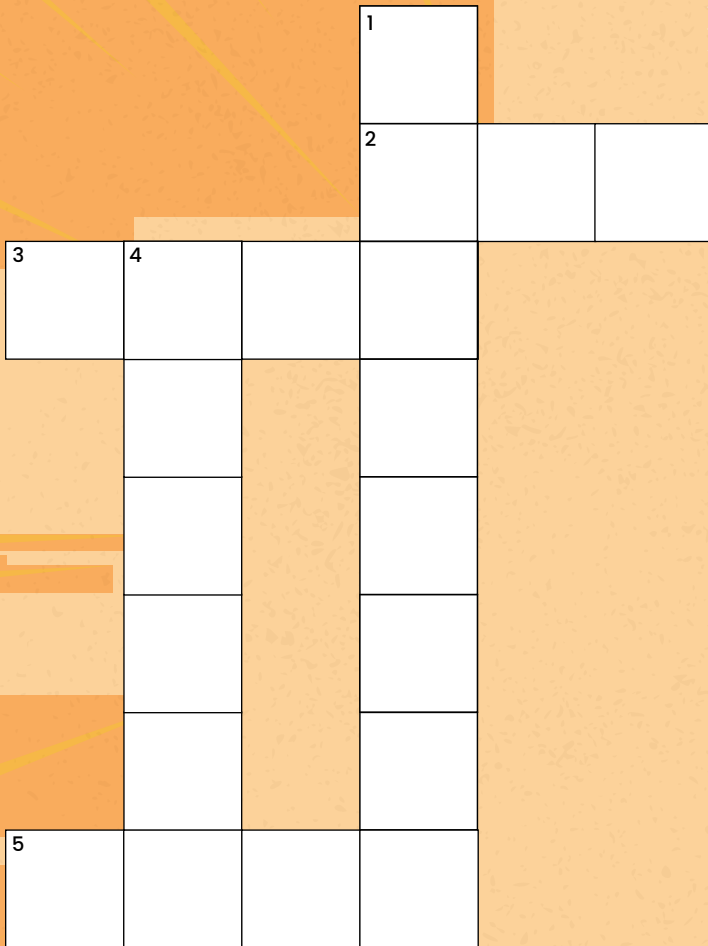
MAR-APR 2021

MAJALAH DWI BULANAN

VOL.6 NO.2



# Teka-Teki Silang



**Mendatar :**

- 2 Kasihan
- 3 Zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan
- 5 Kita

**Menurun :**

- 1 Kemampuan menulis dan membaca
- 4 Alat untuk berinteraksi antarmanusia

Jawaban bisa dikirim melalui direct message (DM) Instagram @badanlitbangkemendagri atau email pid@litbangkemendagri.com. Wajib follow akun Instagram @badanlitbangkemendagri sebelum mengirimkan jawaban Anda. Jangan lupa melampirkan nama, alamat, dan kontak telepon yang bisa dihubungi. Satu pemenang akan mendapat merchandise menarik dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

• • • salam redaksi

# IKHTIAR MEMBANGUN INOVASI

Pembinaan inovasi daerah merupakan fungsi yang tak bisa dipisahkan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri). Melalui fungsi tersebut, Badan Litbang Kemendagri senantiasa berikhtiar membina inovasi di pemerintah daerah. Berbagai upaya dalam meningkatkan inovasi pun telah dilakukan. Salah satunya dengan merajut berbagai praktik inovasi dari pemerintah daerah melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah).

Selama penerapan, Puja Indah selalu mengalami pengembangan. Pada awalnya, aplikasi ini hanya bisa digunakan secara terbatas untuk urusan perizinan *Government to Government*. Namun, saban tahun Badan Litbang Kemendagri terus menambah jenis layanan dalam aplikasi. Di sisi lain, kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pakar inovasi juga digiatkan agar aplikasi Puja Indah kian sempurna. Hingga kini, sejumlah pemerintah daerah telah berkomitmen menggunakannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Terkait isu tersebut, Media BPP pada edisi April 2021 berupaya mengangkat kiprah Puja Indah dalam laporan utama. Media BPP akan mengulas pembentukan

awal, pengembangan, hingga dampak Puja Indah bagi kelangsungan inovasi di daerah. Selain itu, beragam rubrik menarik juga redaksi hadirkan. Seperti pada rubrik lebih dekat yang mengangkat sosok peneliti perempuan berprestasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor R. Siti Zuhro. Pun tidak kalah menarik, kami sajikan juga rubrik resensi untuk menambah daftar referensi bagi pecinta film dan buku.

Berbagai informasi yang disajikan tersebut merupakan ikhtiar dari kami untuk memperkenalkan praktik inovasi ke segala penjuru negeri. Semoga pembaca sekalian mendapat inspirasi dari setiap informasi yang kami suguhkan. Semoga berkenan.

Selamat membaca.

Kurniasih

Sekretaris Badan Litbang Kemendagri



#### Di balik Goresan Sampul:

Badan Litbang Kemendagri meyakini benar bahwa pelayanan publik yang baik dan tata kelola pemerintahan berkualitas akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan terobosan kebijakan yang inovatif guna mempercepat terwujudnya tujuan tersebut. Oleh karena itu Badan Litbang Kemendagri menciptakan aplikasi berbagi pakai bernama Puja Indah. Pada edisi kalini ini, Media BPP akan menceritakan bagaimana kiprah Puja Indah dalam merajut inovasi. Sampul Media BPP, redaksi buat agar dapat menggambarkan kondisi tersebut. Tergambar sosok masyarakat yang ingin menyeberangi jurang berisi tumpukan kertas dengan bertumpu pada layanan dari Puja Indah. Hal ini bisa diartikan bahwa Puja Indah selalu hadir untuk membantu masyarakat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat.

# mediabpp

JENDELA INFORMASI KELITBANGAN

VOLUME 6 NOMOR 2 MARET-APRIL 2021

**PELINDUNG**

MENTERI DALAM NEGERI

**PENANGGUNG JAWAB**

A. FATONI

**PEMIMPIN REDAKSI**

KURNIASIH

**REDAKTUR PELAKSANA**

AJI NUR CAHYO

**REDAKTUR**

MATHEOS TAN

DEDDY WINARWAN

SUMULE TUMBO

**PENYUNTING**

FRISCA NATALIA

**PELIPUTAN**

AHMAD FARID

**PENATA LETAK**

FAJAR HARAMUKTI

**ILUSTRASI COVER**

TRES AGUS

Diterbitkan oleh:



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbangkemdagri.go.id

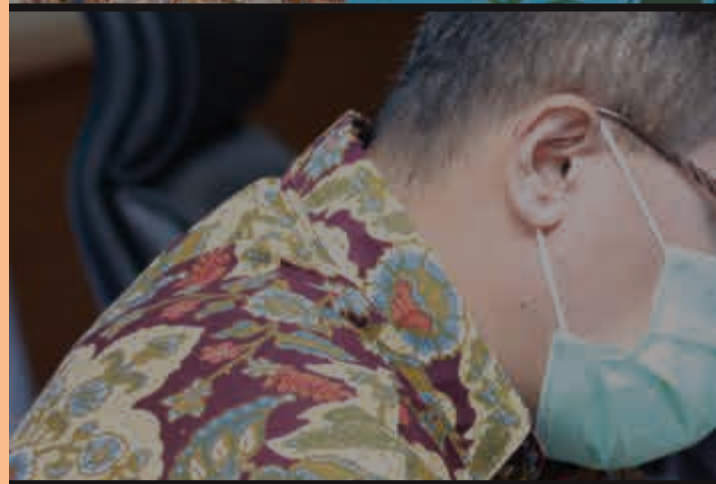
Frekwensi terbitan : 2 bulanan  
Nomor ISSN : 2503-3352 (media cetak)

Keterangan : Kategori sosial  
SK no. 0005.25033352/Jl.3.1/SK.ISSN/2016.04

20 April 2016 (mulai edisi Vol. 1, No. 1, April 2016)



**Kepala Badan Litbang  
Reformasi Birokrasi Tidak Boleh Berhenti**



**lensa matra**



jendela BPP

Minimalisir Resiko Bencana  
Litbang Kemendagri Gelar Diskusi Terfokus

6



aktivitas

Jelang Idul Fitri  
DWP Litbang Kemendagri  
Bagikan Santunan

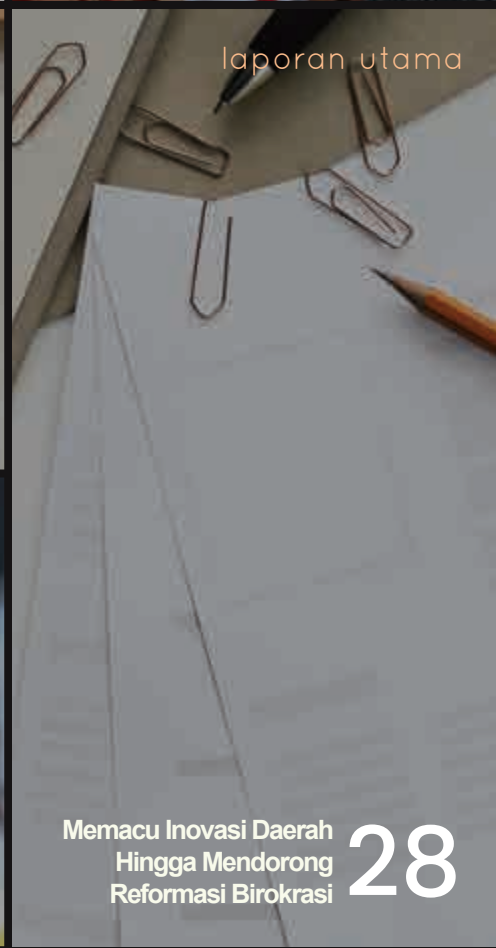
14



laporan utama

Merajut Inovasi dengan Puja Indah

20



laporan utama

Memacu Inovasi Daerah  
Hingga Mendorong  
Reformasi Birokrasi

28



laporan utama

Kembangkan Inovasi Layanan Tematik

24



lebih dekat

Menjalani Berbagai Peran  
Untuk Harmonisasi

36



resensi film

The White Tiger

42



**I**khtiar untuk mereformasi birokrasi tidak boleh berhenti. Upaya tersebut harus terus dilakukan di berbagai sektor dengan tetap mengupayakan persamaan persepsi di antara stakeholder. Demikian disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri A. Fatoni dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Senin (19/4/2021).


Menurut Fatoni, saat ini pemahaman tentang reformasi birokrasi telah dimiliki berbagai pihak. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk menjalankan kinerjanya agar reformasi birokrasi berjalan secara optimal. Fatoni juga berharap tim yang telah ditunjuk untuk menangani program tersebut dapat terus aktif dalam kegiatan. “Setiap unit dan pusat harus melakukan kegiatan yang kiranya

dapat memperkuat pelaksanaan reformasi di lingkungan Badan Litbang,” kata Fatoni.

Sejauh ini, lanjut Fatoni, Badan Litbang dikenal sebagai unit eselon satu yang terus mendorong pelaksanaan inovasi daerah. Oleh karenanya, Badan Litbang dituntut untuk menjadi lembaga yang inovatif dalam rangka mendorong inovasi daerah. Ihwal upaya dalam menerapkan reformasi birokrasi, Badan Litbang Kemendagri terus melakukan pembenahan. Namun hal itu dinilai Fatoni masih tetap membutuhkan masukan dan petunjuk dari berbagai pihak. “Oleh karena itu kami mohon dari MenPAN-RB untuk terus membimbing kami. Dari Biro Organisasi dan Tata Laksana, juga dari Itjen Kemendagri,” kata Fatoni.

Dalam sambutannya yang juga menjadi sesi penutup ra-

# KEPALA BADAN LITBANG: REFORMASI BIROKRASI TIDAK BOLEH BERHENTI



*Kepala Badan Litbang Kemendagri A. Fatoni pada acara Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Senin (19/4/2021).*

pat tersebut, Fatoni mengapresiasi para peserta yang hadir sampai selesai. Hal itu menurutnya mencerminkan semangat dalam menerapkan reformasi birokrasi. “Saya mengucapkan terima kasih, baik dari narasumber, maupun seluruh pegawai yang hadir dan bertahan sampai sekarang,” katanya.

Sementara itu, Analis Kepegawaian Biro Orjala Sekretariat Jenderal Kemendagri Dian Andy Permana mengatakan reformasi birokrasi di lingkup Badan Litbang penting untuk dijalankan dan dikaji bersama. Hal itu mengingat capaian di Badan Litbang berperan menunjang penilaian di lingkungan Kemendagri. Mengenai target ideal yang terus dikejar, sejauh ini capaian tersebut belum bisa diraih. Kondisi tersebut disebabkan pemahaman kinerja dan indikator kinerja yang kurang di level individu. Tak hanya itu,

penyebab lainnya dikarenakan pemahaman kurang di level staf mengenai tugas pokok dan fungsi. “Di sinilah kegiatan kali ini berupaya menjawab kesenjangan melalui sosialisasi,” tuturnya.

Menurut Dian, Badan Litbang memiliki dua tugas pokok guna menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi. Di antaranya terkait mereformasi birokrasi di satuan kerja. Kemudian, menerapkan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih pelayanan. “Ini diharapkan bisa dioptimalkan tahun ini,” pungkasnya.

• AF

# MINIMALISIR RISIKO BENCANA, LITBANG KEMENDAGRI GELAR DISKUSI TERFOKUS

**B**adan Litbang Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Model Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana Tahun 2021, Jumat (9/4/2021). Kajian ini dihelat sebagai upaya mencari model mengurangi risiko bencana alam. Mengingat berbagai wilayah di Indonesia merupakan ring of fire, sehingga memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021, selama rentang waktu 2016-2020, jumlah kasus bencana alam di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.866 kasus bencana alam. Hal itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.306 kasus. Selanjutnya, jumlah itu kembali naik di tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 3.397 dan 3.814 kasus. Namun, tren tersebut menurun di tahun 2020 dengan jumlah 2.952 kasus bencana alam. Demikian paparan yang diungkapkan Sekretaris Badan Litbang Kurniasih ketika membuka acara tersebut di Aula Badan Litbang.

Dalam sambutannya mewakili Kepala Badan Litbang, A. Fatoni, Kurniasih mengatakan upaya penanganan terhadap bencana perlu dilakukan dengan optimal. Itu mengingat sejauh ini mitigasi bencana masih terfokus pada usaha pemerintah, namun kurang memperhatikan kesiapan dari masyarakat. Padahal, secara geografis, geologis, hidrologi, dan demografis, wilayah Indonesia tidak bisa lepas dari kemungkinan terjadinya bencana alam. “Sehingga masyarakat harus dibiasakan sejak dini untuk melatih kesiapsiagaan hidup berdampingan dengan bencana alam yang datang sewaktu-waktu,” papar Sekretaris Badan.

Kurniasih mengatakan bencana alam yang terjadi di Indonesia didominasi oleh hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya.



ing beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu Kurniasih mendorong agar pemda melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, sehingga bisa meminimalisir terjadinya korban. Kurniasih berharap FGD tersebut bisa melahirkan inovasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menangani bencana alam. “Kiranya FGD ini bisa memberi manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan kita semua,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Studi Bencana UGM, Djati Mardiatno menyoroti pentingnya melakukan mitigasi bencana yang benar. Langkah itu dapat dimulai dengan membuat bangunan rumah sesuai karakteristik kebencanaan. Dia mencontohkan bangunan rumah tradisional Jawa yang mengadopsi potensi bencana gempa bumi. Hal itu menjadikan risiko bencana dapat dikurangi. Ihwal bentuk mitigasi dalam lingkup desa, pihaknya telah membuat inovasi bertajuk aplikasi desa SiApps. “Ini terkait alat komunikasi kesiapsiagaan





bencana dan self awareness,” kata Mardiatno yang hadir secara virtual.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbang mengatakan perlunya melakukan mitigasi struktural dan non-struktural. Upaya itu terkait banyaknya bencana alam dalam rentang waktu Januari sampai Maret 2021 yang mengakibatkan 277 orang meninggal dunia. Sedangkan, di saat yang sama, sebanyak 12.422 korban lainnya mengalami luka-luka, serta 12 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, juga masih terdapat 4.140.392 korban yang menderita dan mengungsi. “Ini datanya masih sampai 22 Maret 2021. Belum lagi nanti ditambah dengan kejadian bencana di NTT,” kata Johny dalam paparannya secara virtual.

Menurut Johny, dalam menyikapi potensi bencana, perlu dilakukan gerakan pengurangan risiko bencana. Hal itu dapat dilaksanakan dengan menerapkan cara berpikir ecosystem based. Upaya tersebut, lanjut Johny, bisa dilaku-

kan dengan membentuk “tiga sekolah”. Di antaranya sekolah gunung, yakni melakukan konservasi kawasan hulu. Kemudian sekolah sungai, yaitu gerakan menyelamatkan sungai, mengelola sampah, hingga memanfaatkan sungai ekologis. Serta sekolah laut, yang dilakukan dengan penanaman mangrove, membersihkan pantai, dan memanfaatkan pesisir ekologis. “Ini semua menjadi modal kita menghadapi bencana dengan turut melibatkan masyarakat dan relawan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Marjuki, Analis Kebijakan Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil Kemendagri Yoga Wiratama, serta Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor, Dede Armanysah.

• AF

# SEKRETARIS BADAN LITBANG

## DORONG KOTA CIMAH BERPACU TINGKATKAN INOVASI

**B**eragam bentuk inovasi terus dikembangkan berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Ikhtiar itu dilakukan untuk menciptakan layanan yang optimal dan efisien bagi masyarakat. Sebagai apresiasi atas upaya tersebut, sejak tahun 2017, Badan Litbang Kemendagri memberikan penghargaan bertajuk Innovative Government Award (IGA) kepada pemerintah daerah. Terhitung sejak penghargaan tersebut digelar, Kota Cimahi berhasil menduduki peringkat lima besar daerah inovatif dalam klaster kota pada tahun 2019. Namun pada tahun selanjutnya, Kota Cimahi tidak masuk kedalam peringkat 10 terbaik daerah inovatif. Sehingga diharapkan kota tersebut bisa kembali meningkatkan inovasinya pada tahun ini. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Litbang Kurniasih dalam Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Award (ChiMa) secara virtual, Kamis, (15/4/2021).

Dalam paparannya mewakili Kepala Badan Litbang A. Fatoni, Kurniasih menilai Kota Cimahi memiliki peta kekuatan inovasi daerah cukup tinggi di bidang hasil kreatif, yang berjumlah 86,92 persen. Selain itu, bidang infrastruktur, kecepatan bisnis, dan kecanggihan produk

juga berperan penting dalam menunjang inovasi Kota Cimahi dengan meraih nilai masing-masing 84,46 persen, 82,66 persen, dan 80,08 persen. Bentuk inovasi tersebut mendorong Kota Cimahi berada dalam peringkat 12 daerah inovatif dari 93 kota lainnya di tahun 2020. “Sebenarnya Kota Cimahi hanya membutuhkan dua angka lagi untuk bisa berada dalam sepuluh besar. Karenanya saya mengimbau untuk semua pihak terus berpacu,” katanya.

Kurniasih menambahkan pada era sekarang seluruh komponen pemerintah daerah perlu berinovasi. Hal itu lantaran persaingan yang terjadi begitu ketat terlebih dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum dapat teratasi. “Kami mendorong agar pemerintah daerah agar terus memacu inovasi, demi terus memangkas birokrasi di masa pandemi” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan rasa syukur atas dilaksanakannya kompetisi ChiMa. Agenda ini menurutnya, bisa mendorong lahirnya inovasi dari berbagai sektor pemerintahan yang dia pimpin. Ngatiyana meminta seluruh jajarannya agar bisa beradaptasi



*Sekretaris Badan Litbang memberikan sambutan secara virtual pada acara Inovasi Cimahi Awards yang diselenggarakan oleh Pemkot Cimahi, Kamis (15/04/2021).*

dengan keadaan saat ini. Sebab, dalam kondisi sekarang, masyarakat membutuhkan pelayanan yang efektif dari pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Ngatiyana juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kepala Badan Litbang Kemendagri. Hal itu lantaran kompetisi ChiMa yang dapat berjalan lancar karena dibantu oleh

“Kami mendorong agar pemerintah daerah agar terus memacu inovasi, demi terus memangkas birokrasi di masa pandemi”

layanan Badan Litbang. “Kami juga memohon izin agar pada kompetisi ini bisa menggunakan sistem penilaian dari indeks inovasi daerah milik Badan Litbang Kemendagri,” pungkasnya. (AF)

Sementara itu, Plt. Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan rasa syukur atas dilaksanakannya kompetisi ChiMa. Agenda ini menurutnya, bisa mendorong lahirnya inovasi dari berbagai sektor pemerintahan yang dia pimpin. Ngatiyana meminta seluruh jajarannya agar bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini. Sebab, dalam kondisi sekarang, masyarakat membutuhkan pelayanan yang efektif dari pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Ngatiyana juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kepala Badan Litbang Kemendagri. Hal itu lantaran kompetisi ChiMa yang dapat berjalan lancar karena dibantu oleh layanan Badan Litbang. “Kami juga memohon izin agar pada kompetisi ini bisa menggunakan sistem penilaian dari indeks inovasi daerah milik Badan Litbang Kemendagri,” pungkasnya.

• AF



**B**adan Litbang Kemendagri menggelar simulasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara virtual, Kamis (20/5/2021). Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Litbang Kemendagri, A. Fatoni memberikan arahan dan penegasan bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran IPKD. Pada kesempatan yang sama, hadir Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Sumule Tumbo yang bertindak sebagai pembicara kunci. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin. Simulasi tersebut juga diikuti oleh unsur Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Dalam paparannya, Sumule menyampaikan pengukuran IPKD ke depannya akan dilakukan melalui sistem aplikasi. Hal itu guna membantu kemudahan pengukuran

IPKD untuk mewujudkan peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dengan pengukuran ini, nantinya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diuji konsistensinya berdasarkan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD yang ditetapkan. Implikasinya pemerintah daerah wajib memproyeksikan anggaran yang tersedia sesuai dengan program prioritas.

Dia menambahkan, pengukuran IPKD dilakukan dengan mengukur enam dimensi, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Dengan pengukuran ini kita harapkan siapapun yang menginput tidak ada masalah terhadap hasilnya. Kita ibaratkan aplikasi ini seperti kalkulator, siapapun yang menekan, angka yang di-



# LITBANG KEMENDAGRI GELAR SIMULASI PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

hasilkan sama,” terang Sumule.

Sumule melanjutkan, pengelompokan hasil IPKD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Sementara, penetapan peringkat satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terbaik juga didasarkan masing-masing kategori tersebut. Kemudian, penilaian juga ditetapkan kepada satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terburuk, untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah. Hasil pengukuran IPKD Pemerintah Daerah berpredikat terbaik secara nasional dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Saya harapkan langkah ini dapat meningkatkan pengawasan internal pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Pada sesi simulasi sistem aplikasi pengukuran IPKD, Analisis Kebijakan Badan Litbang Kemendagri, Alexander Y. Dalla,

menyampaikan aplikasi pengukuran IPKD ini dikembangkan oleh Kemendagri dan diberikan secara gratis kepada Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga *user-friendly* dan bersifat *multi-user*, sehingga mudah untuk digunakan oleh pemerintah daerah.

Ihwal kewenangan dalam mengukur IPKD, Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri melakukan pengukuran di tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, pengukuran dilakukan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi yang menjadi representasi Pemerintah Pusat. Karena itulah, Sumule mengimbau agar setiap pemerintah daerah dapat berkoordinasi guna mempercepat penginputan data, agar hasilnya dapat dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. “Mudah-mudahan di bulan Agustus nanti kemudian hasilnya sudah bisa kami publikasikan,” pungkasnya.

• AF

# DORONG KEMANDIRIAN DESA, BADAN LITBANG KEMENDAGRI KAJI MODEL INOVASI BUMDES



**G**una terus mendorong daerah berinovasi, Badan Litbang Kemendagri melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah menggelar Rapat Perumusan Model Inovasi Daerah, di Aula Badan Litbang Kemendagri, Kamis (20/5/2021). Hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Matheos Tan didampingi dengan jajaran pejabat administrasi dan peneliti di lingkungan Badan Litbang Kemendagri. Selain itu, hadir pula Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nugroho Setijo Nagoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan Pegiat IT Laksono Hadisiswanto.

Mengawali sambutan, Matheos Tan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari pelbagai inovasi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah diterapkan di daerah. Harapannya Badan Litbang Kemendagri dapat mengembangkan model inovasi yang telah dipelajari untuk selanjutnya diuji cobakan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Selain itu kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3T. “Tahun ini, kita terapkan model itu di Kabupaten Anambas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap Matheos Tan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lanjut Matheos Tan, menjadi tonggak sejarah baru pelaksanaan pemerintahan desa. Desa kini didorong untuk menjadi sumber-sumber penggerak ekonomi warga untuk mampu hidup produktif. Di sisi lain, desa juga memiliki kearifan dan kekhasan lokal yang harus dimaksimalkan. Potensi ini perlu ditunjang dengan ketersediaan pasar untuk menjual barang-barang hasil desa dengan harga yang memuaskan. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga perlu program pemberdayaan dan memiliki sumber pendapatan asli desa yang dapat dimanfaatkan bersama. “Di situlah keberadaan BUMDes dibutuhkan



**Matheos Tan**  
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah  
Badan Litbang Kemendagri



untuk mengatur itu semua. Untuk itu BUMDes harus terus berinovasi agar masyarakat desa dapat mandiri dan sejahtera.” ujar Matheos Tan.

Sementara itu, Laksono Hadisiswanto mengamini pendapat dari Matheos Tan. Ia menilai potensi ekonomi di desa sangat kuat. Untuk itu, kondisi ini jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun memang saat ini pengelolaan BUMDes masih mengalami kendala seperti minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menjual dan memasarkan produk secara online. “Dibutuhkan inovasi dalam pengelolaannya, misalnya membuat e-com-

merce khusus menjual produk-produk hasil desa. Sekarang jaman sudah mudah, tinggal kita mau atau tidak,” kata Laksono.

Pada akhir acara, Matheos Tan berharap setelah acara ini, Badan Litbang Kemendagri dapat mengembangkan model inovasi BUMDes yang lebih sempurna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

• **AF**



## JELANG IDUL FITRI, DWP LITBANG KEMENDAGRI BAGIKAN SANTUNAN

Sege nap jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri memberikan santunan serta bingkisan kepada siswa TK Per tiwi VIII serta sejumlah pegawai di lingkungan Badan Litbang Kemendagri, Rabu (5/5/2021). Penyerahan bingkisan tersebut meliputi hasil zakat yang dikelola Masjid Baitul Fikroh Badan Litbang Kemendagri, serta sejumlah sumbangan bantuan dari individu dan berbagai pihak. Secara simbolis, pemberian santunan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri A. Fatoni, serta Ketua DWP Badan Litbang Kemendagri Anggar Pramudiani Widyaningtyas A. Fatoni.

Dalam sambutannya, A. Fatoni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sege nap pihak yang tel-

ah membayar zakat melalui Masjid Baitul Fikroh. Melalui pembayaran zakat tersebut dapat mendorong aktivitas beribadah di bulan puasa. Dirinya juga mengapresiasi Ketua DWP Badan Litbang Tyas A. Fatoni yang telah memastikan acara tersebut berjalan sukses dan lancar. Sehingga bingkisan tersebut dapat diserahkan secara optimal dan tepat guna. “Semoga seluruh amal kita selama berpuasa diterima Allah SWT,” katanya di hadapan sege nap pimpinan pejabat dan pengurus DWP Badan Litbang Kemendagri.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni menyampaikan permohonan maaf secara pribadi maupun atas nama pimpinan Badan Litbang Kemendagri. Hal itu diungkapkannya seiring momentum Hari Raya Idul Fitri yang akan tiba beberapa hari ke depan. “Kami memohon maaf lahir batin.

Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT,” jelasnya.

Fatoni mengingatkan agar semua unsur pegawai di lingkungan Badan Litbang Kemendagri untuk tidak melaksanakan mudik. Himbauan itu dilakukan untuk menekan tren penularan kasus positif Covid-19 yang kembali naik di sejumlah negara, seperti India. Untuk itu, pada suasana lebaran dirinya meminta agar semua pihak menahan diri untuk melakukan kegiatan mudik. “Silaturahmi bersama keluarga kita lakukan secara virtual saja,” ujar Fatoni. Selain itu, Fatoni juga mewanti semua pegawai agar tidak melakukan kegiatan yang berpeluang meningkatkan penularan Covid-19. Hal itu di antaranya seperti berbelanja di pusat perbelanjaan, terbuka bersama dengan diikuti banyak orang, serta melakukan halal bihalal





secara berkerumun.

Apalagi, kata Fatoni, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran ihwal pelarangan melakukan buka bersama dan halal bihalal dalam skala besar, terutama bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan di lingkup Kemendagri. Dalam surat edaran bertarikh 4 Mei 2021 tersebut, Mendagri mengatakan jajaran kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota agar membatasi pergerakan masyarakat guna menekan angka kenaikan positif Covid-19. “Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah untuk tidak melakukan *open house*/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1442/2021,” bunyi surat tersebut.

Seperti diketahui, acara tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan di lingkungan Badan Litbang Kemendagri. Di antaranya Sekretaris Badan Litbang Kemendagri Kurniasih, Kepala Pusat Litbang (Puslitbang) Inovasi Daerah Matheos Tan, Kepala Puslitbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum Deddy Winarman, serta berb-

agai pejabat lainnya. Acara penyerahan bingkisan tersebut sendiri diakhiri dengan sesi foto bersama.

### Lakukan Kunjungan ke TK Pertiwi VIII

Sementara itu, di hari berikutnya Kamis (6/5/2021), segenap jajaran pengurus DPW Badan Litbang yang dipimpin Anggar Pramudiani Widyaningtyas A. Fatoni melakukan kunjungan ke TK Pertiwi VIII di kawasan Bekasi Barat. Kunjungan tersebut merupakan lanjutan dari acara sebelumnya. Di TK Pertiwi VIII Tyas A. Fatoni kembali menyerahkan bingkisan kepada para siswa di sana. Tyas ditemani Sekretaris Badan Kurniasih, serta seluruh komponen pimpinan pengurus DWP Badan Litbang Kemendagri.

Dalam paparannya, Tyas mengatakan kunjungan tersebut digagas sebagai ikhtiar silaturahmi jelang berlangsungnya Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah. Sekaligus kembali mendekatkan DWP Badan Litbang Kemendagri dengan para pengurus TK Pertiwi VIII. Sebab, TK Pertiwi

VIII sendiri merupakan wahana pendidikan binaan dari DWP Badan Litbang Kemendagri.

Berkaitan hal itu, Tyas mengajak segenap pengurus untuk memikirkan kondisi sekolah tersebut. Mengingat di masa pandemi, tantangan belajar-mengajar terbilang cukup kompleks. Dirinya meminta ke depan diadakan kajian, rapat, ataupun diskusi guna menghasilkan kebijakan konkret ihwal kemajuan TK Pertiwi VIII.

Sekretaris Badan Litbang Kurniasih mengungkapkan, silaturahmi tersebut merupakan kunjungan perdana pengurus DWP Badan Litbang Kemendagri. Sebab, mayoritas anggotanya terisi oleh orang-orang baru. Oleh karena itu dia berharap ke depan bisa memunculkan strategi guna mendorong kemajuan sekolah. “Di bawah kepemimpinan Bu Ketua, kami harapkan bisa semakin membuat sekolah semakin maju,” papar Kurniasih yang juga menjabat sebagai wakil ketua 1.

• AF



# BADAN LITBANG KEMENDAGRI DORONG PELAYANAN DESA LEBIH PROFESIONAL

**K**emajuan peradaban manusia menuntut dilaksanakannya inovasi di berbagai sektor, tak terkecuali pemerintahan desa. Karenanya diperlukan ikhtiar yang masif guna menjalankan roda pemerintahan secara profesional. Ikhtiar tersebut diterapkan agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Sehingga dengan itu masyarakat lebih sejahtera. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kurniasih, dalam agenda Seminar Kajian Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa yang berlangsung di Aula Badan Litbang Kemendagri, Rabu (5/5/2021).

Menurut Kurniasih, substansi dari pelaksanaan pelayanan publik sejatinya berlangsung di desa. Sebab hal tersebut telah menyasar kebutuhan

masyarakat. Sehingga, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanannya menjadi lebih optimal dan inovatif. Apalagi, perkembangan zaman saat ini tengah mengalami kemajuan dari era 4.0 menuju 5.0. Ihwal kondisi pelayanan pemerintahan desa, Kurniasih mencontohkan situasi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu lalu. Saat itu, demi mendorong tuntasnya pelayanan desa lebih cepat, sang bupati harus berkantor di desa tersebut selama satu minggu. “Masa iya kepala desa yang telah disumpah untuk melayani masyarakat, perlu ditinjau langsung oleh bupati agar urusan desa selesai? Inilah tantangan yang harus dihadapi ke depan,” kata Kurniasih memaparkan.

Kurniasih menambahkan, ketidakprofesionalan pemerintah desa dalam

memberikan pelayanan juga dialaminya sendiri. Saat itu dirinya tengah mengurus administrasi di desa. Namun justru tidak memiliki kewajiban dalam membayar biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). “Saat itu mungkin situasinya menguntungkan buat saya. Tapi sebagai objek pajak, seharusnya hal ini bisa menunjang pendapatan daerah,” tambahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kurniasih mengatakan agar segenap stakeholder memberikan dukungan pengetahuan bagi pemerintah desa. Sebab, dikatakannya saat ini pelayanan di desa masih tidak sesuai. Misalnya, durasi bekerja yang sejatinya berlangsung sehari penuh, kerap selesai pada pukul 12.00 siang.

Persoalan lainnya yang juga menjadi catatan yakni merenggangnya



kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat. Kepala desa dinilai bisa menjalin kedekatan hanya ketika proses pemilihan kepala desa berlangsung. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat tidak mengenali pemimpinnya. Padahal, menurut regulasi, pemerintah desa berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai bentuk realitas tersebut, tambah Kurniasih, seyogyanya tidak hanya menjadi kajian ihwal revisi undang-undang pemerintahan desa. Namun menjadi cambuk agar terus mendorong trobosan pemerintah desa lebih profesional. Selama lima tahun ke belakang, dinilai banyak tuntutan sekretaris desa agar diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dengan ketentuan tersebut, nantinya pemerintah desa secara

tidak langsung harus tunduk pada undang-undang ASN. Termasuk dalam hal jam kerja. “Hal inilah yang tentunya menjadi kajian menarik,” katanya.

Selain itu, Kurniasih juga menyoroti salah satu desa yang dinilai kurang profesional di Kota Bogor. Saat itu banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi ketika pembagian bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, pelaksanaannya diyakini tidak transparan. Karena itu, asistensi pengetahuan ke sektor desa perlu dilakukan. Di samping juga turut mendorong agar desa senantiasa melakukan trobosan baru.

Berkaitan dengan desa inovatif, diktakannya ada salah satu desa yang dinilai berhasil melaksanakan trobosan brilian. Yaitu dengan mengenalkan budidaya anggur di kawasan tersebut. Para pengunjung yang datang ke desa itu dapat memetik dan mengonsumsi anggur. Sehingga, melalui ikhtiar agribisnis itu, secara tidak langsung desa tersebut telah bersiap untuk menyongsong kemajuan zaman. “Ini adalah bentuk inovasi agribisnis menarik dalam mempersiapkan era revolusi industri 5.0,” tukasnya.

### Urgensi Inovasi di Desa

Seperti diketahui desa merupakan layanan pemerintahan paling dasar. Pada pelaksanaan pemerintahannya, diperlukan inovasi menyeluruh guna meraih pendapatan bagi desa. Kurniasih mencontohkan kondisi krisis yang terjadi di tahun 1997-1998. Ketika resesi menerjang Indonesia, ekonomi masyarakat tertolong oleh geliat UMKM. “Dan UMKM itu kita tahu kebanyakan masyarakatnya berasal dari desa,” jelas Kurniasih.

Dirinya mendorong agar kepala desa lebih sering melakukan studi banding ke kawasan lain. Utamanya pada desa yang dinilai lebih inovatif dan maju. Dengan ikhtiar tersebut, wawasan

tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dapat tersebar merata. Selain itu, di tataran regulasi agar dipikirkan secara bersama lintas *stakeholder*. Sebab kajian pengurusan tentang desa dilakukan oleh Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk itu pihaknya berharap pada kajian tersebut bisa menghasilkan rumusan kebijakan guna membangun kualitas pemerintah desa. “Saya harap pada kesempatan kali ini kita bisa menghasilkan gagasan, kesimpulan, dan saran yang bisa disampaikan ke Pak Menteri. Saya yakin Pak Rian dan narasumber lainnya bisa memberikan banyak pencerahan terkait itu,” pungkasnya.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Desa Riant Nugroho mengatakan pemerintahan desa memungkinkan dinilai berdasarkan Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa (PKPD). Namun hal itu memerlukan catatan di mana pengukuran penilaiannya berdasarkan masyarakat. Sebab, jika hanya mengacu pada sudut pandang pemerintahan, hal itu belum tentu selaras dengan kesejahteraan masyarakat.

“Konsep pengukuran kinerja pemerintahan desa yang lebih dilihat dari sudut pandang birokrasi pemerintahan supradesa, biasanya kurang memberi peluang terhadap persepsi masyarakat sebagai subyek dan obyek dari penyelenggaraan pemerintahan desa,” tukasnya.

Seperti diketahui, dalam seminar tersebut hadir pula Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat *Marketplace* Desa Kami Kris Budihardjo, dan Analis Kebijakan Madya Bidang Pemerintahan Desa Gatot Tri Laksono, serta Peneliti Ahli Pertama BPP Kemendagri Worry M. Manoby.

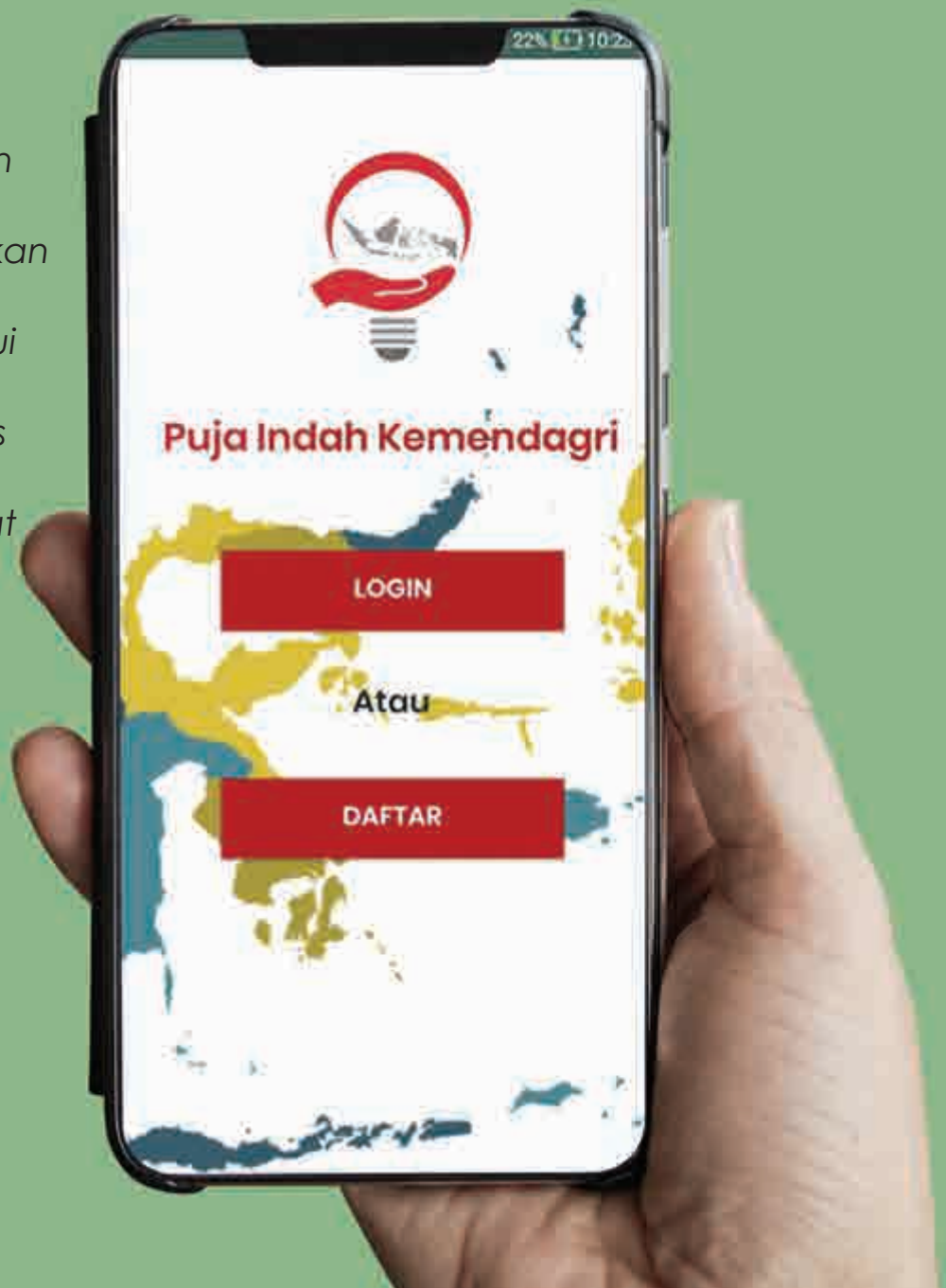
• AF

LAPORAN UTAMA

# MERAJUT INOVASI DENGAN PUJA INDAH

Teks AF Foto Freepik

*Upaya membangun inovasi di daerah senantiasa digalakkan Badan Litbang Kemendagri. Melalui aplikasi Puja Indah, Badan Litbang terus menebar inovasi guna mempercepat layanan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.*



Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) langsung bergerak cepat untuk menindaklanjutinya. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam peraturan tersebut adalah Bab XII ihwal Inovasi Daerah. Dalam bab tersebut diuraikan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Selanjutnya, pemerintah pusat diamanatkan untuk memberikan penilaian dan penghargaan terhadap inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Hal ini lantas ditindaklanjuti Badan Litbang Kemendagri dengan membentuk unit kerja eselon II bernama Pusat Litbang (Puslitbang) Inovasi Daerah.

Dalam perjalanannya pasca didirikan, Puslitbang Inovasi Daerah gencar melakukan observasi mengenai sejauh mana penerapan inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dari berbagai observasi tersebut diketahui penerapan inovasi di daerah ternyata belum merata. Kondisi ini terjadi lantaran sebagian pemerintah daerah belum banyak melakukan inovasi, namun disisi lain, sebagian daerah lainnya telah berhasil melakukan berbagai terobosan. Analis Ahli Muda Puslitbang Inovasi Daerah, Isman mengatakan seringkali daerah berdalih bahwa untuk melakukan inovasi membutuhkan pembiayaan yang besar. Terlebih apabila inovasi tersebut menyangkut pembangunan aplikasi. “Daerah terutama yang memiliki anggaran kecil, merasa kesulitan menciptakan inovasi dalam bentuk aplikasi. Meski idenya sudah ada. Inilah yang menyebabkan praktik inovasi tidak merata,” tutur Isman.

Berdasarkan hasil temuan tersebut Puslitbang Inovasi Daerah berkeinginan agar inovasi daerah dapat lebih inklusif bagi daerah. Oleh karena itu, Badan Litbang Kemendagri meresponsnya dengan menciptakan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah pada tahun 2017. Landasan pembentukan aplikasi tersebut, lanjut Isman, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Khususnya, pada Bab IV yang menyebutkan bahwa menteri melakukan diseminasi terhadap penerapan inovasi daerah, di mana diseminasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan inovasi daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada daerah lain.

Aplikasi Puja Indah sendiri merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional. Pembentukannya digagas sebagai ikhtiar mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan integrasi inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Secara teknis, lanjut Isman, Puja indah adalah ap-

likasi layanan pemerintahan berbagi pakai (*multi tenant*) berbasis data input yang dikembangkan untuk percepatan pelayanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu *platform*. “Pemda dapat menggunakannya secara gratis,” ujar Isman.

Dirinya menambahkan, Puja Indah dibuat sebagai upaya memudahkan pemerintah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di mana, konsentrasi pembentukannya ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. “Dengan Puja Indah ini, kita berikhtiar untuk memotivasi pemerintah daerah bagaimana dapat menyelenggarakan SPBE. Kita juga membantu agar mereka bisa memanfaatkan data yang tersedia di aplikasi ini, untuk digunakan dalam menjalankan kebijakan,” kata Isman.

Isman menjelaskan, di awal pembentukan model awal aplikasi tersebut masih berbentuk embrio. Hal itu karena layanan dalam aplikasi masih sebatas pada *Government to Government* (G2G). Puja Indah versi awal tersebut juga belum bisa diintegrasikan ke komponen terkait, sehingga dalam penggunaannya baru bisa dijalankan oleh internal secara terbatas. Dalam tahapan ini pula, aplikasi Puja Indah masih dalam fase versi 1.0. Artinya, belum terlalu mudah untuk digunakan.

Kemudian kabar menggembirakan datang di tahun 2018. Layanan Puja Indah mengalami perbaikan dan peningkatan. Pada tahapan tersebut, Puja Indah telah terintegrasi. Puslitbang Inovasi Daerah juga menambah enam layanan di dalamnya serta melakukan perbaikan satu layanan dari tahun sebelumnya yang masih terbatas, yakni G2G. Enam tambahan tersebut antara lain, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan komoditas, layanan aspirasi, layanan ketenagakerjaan, dan layanan update data kependudukan.

Sementara itu Analis Ahli Madya Puslitbang Inovasi Daerah Jonggi Tambunan mengungkapkan perbaikan dan peningkatan setiap layanan tersebut dilakukan juga sebagai upaya mendorong kemudahan pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Karenanya di tahun 2019, layanan Puja Indah juga kembali ditingkatkan. Sebanyak tujuh layanan baru ditambahkan, antara lain layanan perhubungan, sosial, pekerjaan umum, administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (*trantibum linmas*), dan pariwisata. Sampai sejauh ini, kata Jonggi, telah tersedia sebanyak 13 layanan pemerintahan. Ke depan dirinya menargetkan di setiap urusan wajib pemerintah dapat terbantu dengan satu inovasi yang dihasilkan. “Ke depan kita harapkan agar terjadi penambahan 19 layanan lagi untuk mempermudah 32 urusan wajib

pemerintah daerah,” kata Jonggi saat ditemui di ruangannya, Rabu (7/4/2021).

Jonggi menambahkan, di tahun 2020 penambahan layanan Puja Indah sempat terhenti. Hal itu dikarenakan pandemi Covid-19 yang juga mengakibatkan aktivitas terhambat, seperti halnya proses sosialisasi, hingga dalam hal penganggaran. “Di tahun kemarin (2020) kami tidak bisa berbuat banyak, karena selain refocusing anggaran, pelayanan kami juga terbatas oleh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” ujar Jonggi.

Jonggi mengatakan pada 2021 ini pihaknya telah memulai kembali penerapan aplikasi Puja Indah. Hal itu diwujudkan dengan tengah dikajinya berbagai rencana penambahan layanan lain, serta melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Puja Indah. Ke depan dirinya berharap ikhtiar tersebut dapat memberi inspirasi pemerintah daerah dalam menunjang inovasi di daerahnya.

### Kolaborasi Lintas Sektor

Guna mendorong pelaksanaan Puja Indah lebih optimal, Kepala Puslitbang Inovasi Daerah Matheos Tan mengungkapkan pihaknya telah menggandeng berbagai pihak terkait. Kerja sama tersebut digagas berdasarkan tingkat kebutuhan dalam meningkatkan layanan aplikasi Puja Indah. Seperti halnya pada kebutuhan penyediaan ruang penyimpanan data, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kemendagri. Dengan hasil kerja sama tersebut, para pemerintah daerah dapat mengakses layanan, memperoleh informasi, sekaligus memanfaatkan data di dalamnya secara cuma-cuma.

Pada 2021 ini, kata Theo, pihaknya kembali melakukan upaya kolaborasi. Kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) digandeng untuk menyempurnakan ruang penyimpanan data yang lebih komprehensif. Puslitbang Inovasi Daerah juga telah menyurati Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo, Bambang Dwi Anggono agar ke depan dapat dibantu ihwal penguatan server, bandwidth, dan dukungan tenaga ahli dari Kominfo. Surat itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di gedung Badan Litbang Kemendagri medio 14-15 April 2021. “Upaya ini tentunya karena Puja Indah akan dipakai di sistem secara nasional. Sehingga membutuhkan penguatan yang intensif,” terang Theo.

Tidak hanya berkolaborasi dengan kementerian, pengembangan Puja Indah juga turut mengajak praktisi dan pakar inovasi. Nantinya para praktisi dan pakar inovasi itu akan membantu dalam hal pengkajian inovasi. Dari tahapan tersebut, layanan dapat diterapkan sebagai pilot project untuk kemudian diimplementasikan secara nasional. “Langkah-langkah ini terus kami lakukan guna menjawab kebutuhan inovasi di daerah,”



tambahnya.

### Menjawab Berbagai Permasalahan

Theo meyakini pembentukan Puja Indah merupakan langkah tepat untuk menjawab berbagai masalah yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dirinya menjelaskan, dalam urusan kesehatan misalnya, layanan tersebut dibentuk guna menunjang pelayanan di instansi kesehatan milik pemerintah maupun swasta secara cepat, tepat, mudah, dan terintegrasi. Layanan ini juga menyediakan data/ grafik mengenai tren kesehatan di lingkup masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan berdasarkan data tersebut.

Sedangkan pada layanan pendidikan ditujukan untuk memberikan informasi kegiatan belajar mengajar. Aplikasi ini diperuntukan agar wali murid, pihak



Kepala Badan Litbang Kemendagri A. Fatoni membuka acara Bimtek Puja Indah bagi Pemerintah Daerah di Aula Badan Litbang Kemendagri, Senin (22/02/2021)

sekolah, dan peserta didik memperoleh kemudahan dalam mengkomunikasikan perkembangan pendidikan. Tak hanya itu, dalam layanan ini *stakeholder* dapat juga menentukan kebijakan pendidikan yang terbaik berdasarkan data yang tersedia dalam aplikasi. Sementara dalam layanan komoditas, bidang tersebut dihadirkan guna memberikan informasi tentang harga sembilan kebutuhan bahan pokok. Data ini nantinya bisa diakses para distributor untuk menormalisasi harga dengan menggunakan mekanisme pasar. Dengan layanan ini pula, pemerintah daerah dapat menggunakan data yang tersedia sebagai bahan kajian untuk mere-

distribusi barang kebutuhan sembilan bahan pokok.

Sementara dalam layanan aspirasi, Theo menambahkan, keberadaannya ditujukan sebagai media untuk menyampaikan masukan dan saran mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi kepada DPRD setempat. Sehingga, jika terdapat suatu persoalan, publik dapat langsung berinteraksi dengan *stakeholder*. Dengan demikian proses pengaduan yang biasanya memakan waktu, bisa dilakukan lebih ringkas dan efisien. Theo melanjutkan, pada layanan ketenagakerjaan digagas se-

bagai upaya untuk mempermudah pencarian informasi lowongan dan pelatihan pekerjaan. Layanan ini memungkinkan publik bisa terhubung langsung dengan perusahaan penyedia pekerjaan. “Kemudian layanan ini juga bisa menjadi pertimbangan kepala daerah untuk mengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan,” terangnya.

Kemudian di bidang layanan update data kependudukan, dibentuk sebagai ikhtiar menjawab persoalan dalam hal validasi data. Ke depan, layanan kependudukan ini dapat diterapkan secara daring. Inovasi dalam layanan ini ditargetkan dapat



*Badan Litbang Kemendagri mengadakan Bimbingan Teknis Puja Indah bagi pemerintah daerah secara virtual di Aula Badan Litbang Kemendagri, Senin (22/02/2021)*

mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Selain itu, karena pemutakhiran data-data di dalamnya dilaksanakan secara berkala, pengampu kebijakan dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya, pada layanan perhubungan dibentuk guna membantu percepatan penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari kir kendaraan. Aplikasi ini memiliki misi utama menjamin fungsi keselamatan, terutama mengenai berkendara.

Theo menambahkan, pada layanan sosial, keberadaannya diupayakan

untuk membantu pemberian bantuan/layanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti anak terlantar, yatim piatu, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, anak kekurangan pangan, busung lapar. Sedangkan pada layanan pekerjaan umum, diperuntukan sebagai layanan yang menyediakan informasi sarana publik milik pemerintah. Fungsi di dalamnya yaitu sebagai tempat pengaduan terhadap kerusakan jalan, jembatan, serta sarana publik lainnya. Ia dibentuk untuk membantu pengelolaan alat berat secara efektif dan efisien yang menjadi aset daerah dalam mening-

katkan pendapatan daerah.

Ihwal layanan administrasi pemerintahan (G2G), diciptakan sebagai percepatan proses administrasi internal perangkat daerah, antar-perangkat daerah, dan antar-pemerintahan daerah sesuai tingkatannya. Secara rinci layanan ini memangkas proses birokrasi yang memakan waktu, sebab dapat dijalankan secara online. Terkait kemudahan yang dihasilkan dari inovasi Puja Indah lainnya adalah layanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum linmas). Melalui aplikasi ini, publik dapat menyampaikan





keluhan mengenai trantibum linmas. Di dalamnya masyarakat juga dapat berkoordinasi mengenai penanganan bencana alam dan sarana informasi hukum di daerah.


Sedangkan kemudahan yang dihasilkan melalui layanan sektor pariwisata, aplikasi ini memungkinkan publik memperoleh informasi layanan wisata. Di dalam aplikasi tersebut, tersedia peta, lokasi penginapan terdekat, jadwal festival, hingga biaya dan akses transportasi ke tempat wisata. Ikhtiar tersebut, lanjut Theo, diharapkan bisa membantu publikasi destinasi wisata daerah. Sehingga ke depan

jika daerah wisata ramai dikunjungi, mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, terhadap layanan tematik, Puslitbang Inovasi Daerah mengembangkan aplikasi E-Ternak. Berbeda dengan 13 layanan sebelumnya, E-Ternak diciptakan sebagai program prioritas nasional yang berbentuk aplikasi layanan publik. Layanan ini diyakini ke depan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing di sektor peternakan.

Terkait berbagai kemudahan yang dihasilkan tersebut, Theo menjelaskan pihaknya terus berikhtiar untuk

dapat menebarkan inovasi Puja Indah kepada para pemerintah daerah. Sejauh ini dirinya mengatakan telah menjalin MoU dengan 94 kepala daerah. Sedangkan pada tahun 2021 ini, Theo menargetkan dapat menggandeng lebih banyak lagi. "Tahun ini jumlah pemerintah daerah yang digandeng akan mengalami penambahan sejalan dengan target dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kami merencanakan sebanyak 20 pemerintah daerah akan bersinergi untuk menggunakan aplikasi Puja Indah," pungkasnya.

• AF



**H**ari menjelang siang ketika Matheos Tan, Kepala Pusat Litbang (Puslitbang) Inovasi Daerah, duduk seksama di ruang kerjanya, Selasa (13/4/2021). Ia yang ditemani Peneliti Puslitbang Inovasi Daerah, Adi Suhendra, tengah membahas perkembangan inovasi daerah. Dalam suasana cair itu, Theo bercerita mengenai perjalanan Puja Indah. Sejak awal dibuat, Puja Indah telah menghasilkan berbagai layanan guna menunjang lahirnya inovasi di daerah. Sampai saat ini, Puja Indah memiliki 13 layanan untuk urusan pemerintahan dan satu layanan tematik bernama Elektronik Ternak (E-Ternak).

Aplikasi E-Ternak merupakan layanan tematik bidang peternakan yang memiliki fungsi sebagai pendataan dan pengendalian hewan ternak. Layanan tersebut dibentuk guna meningkatkan daya saing sektor peternakan. Selain itu, keberadaan aplikasi tersebut ditujukan guna mempertemukan peternak, pemodal, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, UMKM, dan Dinas Peternakan. Sistem aplikasi ini mengatur bagaimana peternak

bisa mendapatkan modal, baik melalui BUMDes, koperasi, maupun UMKM. Peternak di sini diperbolehkan dalam bentuk perorangan atau kelompok. Di dalam layanan ini, nantinya pihak pendamping peternak atau BUMDes diminta mengisi informasi mengenai data dan perkembangan hewan ternak. Antara lain jumlah, kondisi kesehatan, usia, hingga harga hewan yang diternak. “Jadi, orang bekerja dalam satu sistem untuk mendatangkan keuntungan dari berbagai pihak. Peternak juga terbantu, BUMDES juga jalan dan seterusnya,” kata Theo.

Theo menambahkan, aplikasi E-Ternak diciptakan untuk membangun bank data peternakan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Secara teknis, penerapan aplikasi tersebut dilakukan dengan menginput data ternak secara daring (*web and android based*) oleh BUMDes atau pendamping ternak. Di dalam aplikasi E-Ternak terdapat informasi peta pembinaan di sektor peternakan, serta sarana tutorial/edukasi bagi peternak. Dengan pelayanan tersebut, para peternak yang membutuhkan data terbaru perihal kondisi hewan ternak dapat mengetahui lebih cepat. Theo menga-

# KEMBANGKAN LAYANAN INOVASI TEMATIK

takan, guna mendorong meningkatnya transaksi peternak dan penjual, aplikasi E-Ternak menyediakan layanan pasar ternak. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berkecimpung di dunia peternakan. Tidak hanya itu, pelayanan di dalam aplikasi tersebut juga ditunjang dengan tersedianya rumah potong hewan (RPH). Ikhtiar tersebut diharapkan mendorong kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai ketersediaan suplai daging ternak.

Menurut Theo, ke depan dengan aplikasi E-Ternak memungkinkan terjadinya kemudahan dalam pendataan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan oleh pemerintah daerah. Sebab segala pros dapat dipantau langsung melalui aplikasi. Dengan upaya itu pula, nantinya pemerintah daerah bisa membuat kebijakan mengenai peternakan mengacu pada informasi yang diperoleh. Theo meyakini ke depan aplikasi E-Ternak mampu memberikan peluang bisnis yang menjanjikan di sektor peternakan, alasannya kelak jika proses transaksi di bidang peternakan ramai, secara tidak langsung dapat membuka potensi ekspor dan

ekspansi penjualan ke daerah lain.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Puslitbang Inovasi Daerah, Isman, mengatakan sejarah dicetuskannya layanan inovasi tematik berbasis peternakan bermula dari kajian Puslitbang Inovasi Daerah dengan pemerintah daerah. Saat itu, pihaknya mengkaji berbagai topik yang menjadi bahasan umum di masyarakat. Dari kajian tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan dibentuk layanan inovasi peternakan. Pemicunya, sektor tersebut dinilai memiliki tantangan yang cenderung kompleks. Hal itu mulai dari harga daging yang relatif fluktuatif, serta merebaknya isu impor hewan ternak. Padahal, bidang peternakan dinilai memiliki potensi keuntungan yang tinggi, sebab karakteristik lingkungan di Indonesia dianggap cocok bagi perkembangan hewan ternak.

Puslitbang Inovasi Daerah, kata Isman kemudian melakukan diseminasi inovasi di bidang peternakan ke berbagai pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari situ kemudian digagas aplikasi E-Ter-

nak untuk diterapkan secara nasional. Sementara itu dalam menunjang layanan inovasi E-Ternak, Isman menambahkan pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Dirinya berkoordinasi guna mengembangkan layanan E-Ternak lebih luas. Salah satu bentuknya berupa pengembangan layanan asuransi peternakan. Namun, secara teknis mekanisme penggunaan layanan tersebut masih dalam proses penyempurnaan.

Isman menambahkan pada awal dibentuk E-Ternak, Puslitbang Inovasi Daerah menjadikan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia sebagai pilot project. Daerah tersebut diminta untuk mencoba layanan E-Ternak sebelum didemonstrasikan secara nasional. Dirinya melanjutkan, untuk penerapan awal layanan E-Ternak, pihaknya telah meminta daerah di Maluku dan Nusa Tenggara Timur untuk menjalankannya. Setelah dirasa sesuai, layanan tersebut kemudian diterapkan ke berbagai daerah lainnya. “Nanti jika daerah-daerah mau menerapkan ini, bisa mengirimkan permintaan ke kami,” kata Isman menjelaskan.

Saat ini E-Ternak terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal teknis pada penggunaannya agar user friendly. Ke depan Isman berharap dapat menjangkau kolaborasi lebih luas dengan stakeholder lainnya. Langkah tersebut dicapai agar semakin memudahkan penggunaan layanan. Sehingga, ke depan diharapkan semakin dapat memajukan sektor peternakan di Indonesia.

Tak hanya itu, Isman berharap agar kelak semua daerah menggunakan layanan E-Ternak. Sebab, jika layanan ini telah dipakai serentak, pendataan mengenai hewan ternak bisa lebih mudah. Sehingga ketika ingin mengetahui harga, jumlah penambahan hewan ternak, sampai kondisi terkini hewan ternak di daerah tertentu,

bisa dilacak melalui aplikasi E-Ternak. Isman menambahkan kelak jika layanan tematik E-Ternak menunjukkan perkembangan pesat, secara tidak langsung dapat menginspirasi percepatan inovasi untuk layanan tematik lainnya. “Saya kira inilah bentuk dari implementasi pelayanan hulu-hilir dalam mengelola urusan,” tambahnya.

### Kaji Penambahan Layanan Tematik

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini Puslitbang Inovasi Daerah fokus untuk melakukan penambahan layanan tematik. Terobosan tersebut dipilih guna meningkatkan pelayanan inovasi yang lebih menyasar pada tema tertentu. Selain itu, digagasnya inovasi tersebut ditujukan demi meningkatkan daya saing inovasi di daerah. Berkaitan dengan hal itu, Isman mengatakan di tahun 2021 ini pihaknya tengah mengkaji penambahan tiga layanan tematik. Antara lain, aplikasi elektronik pendapatan daerah (E-Panda), data tunggal daerah (DTD) kemiskinan, dan layanan inovasi BUMDes. Ketiga layanan tematik tersebut dibentuk berdasarkan observasi yang telah dilakukan Puslitbang Inovasi Daerah ke berbagai daerah.

Terkait pelayanan E-Panda, proses pembentukannya berdasarkan replikasi inovasi Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) di Kabupaten Sumedang. Dalam layanan inovasi tersebut, Isman mengatakan, Puslitbang Inovasi Daerah mencoba mengembangkan bisnis model tersebut menjadi lebih lengkap. Hal itu seperti pada sisi pembayaran pajak bumi bangunan, pajak restoran, hotel, hiburan, dan berbagai instrumen perpajakan lainnya, yang dapat diintegrasikan dengan stakeholder. Isman berharap ke depannya, Badan Litbang Kemendagri bisa berkolaborasi lebih jauh dengan komponen terkait, seperti Dirjen Keuangan Daerah.



Sementara itu, mengenai layanan DTD kemiskinan, Isman mengatakan inovasi tersebut dibuat setelah melakukan replikasi inovasi UGD Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Namun di daerah tersebut, pendataan kemiskinan terkendala oleh proses validasi. Merespons hal tersebut, kemudian pihaknya menjalankan pembaharuan inovasi itu dengan menekankan validasi data kemiskinan, yaitu bagaimana memutakhirkan data yang tersedia. Menurut Isman, sejatinya selama ini pemerintah daerah telah menjalankan perintah Presiden Joko Widodo dalam menerapkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, sebagai sarana menyalurkan bantuan sosial (Bansos). Namun, pada waktu tertentu data kemiskinan kerap mengalami perubahan. Sedangkan, pada tiap perubahan tersebut sendiri diperlukan proses validasi melalui musyawarah desa. “Persoalannya, sekarang di masa pandemi Covid-19. Bagaimana masyarakat bisa melakukan validasi? Di situlah aplikasi ini bisa mengintervensi tantangan tersebut,” katanya.



**Isman AP**  
Analis Kebijakan Ahli Muda  
Badan Litbang Kemendagri

Di dalam layanan DTD kemiskinan, nantinya data kemiskinan bisa diakses oleh publik. Masyarakat dapat mengusulkan pihak tertentu yang dianggap relevan dengan indikator kemiskinan ataupun sebaliknya melalui sistem di dalam aplikasi. Lalu pihak desa dapat menjadikan usulan tersebut sebagai bahan pertimbangan di dalam melakukan validasi yang ditetapkan di musyawarah desa. Isman berharap, dengan diterapkannya aplikasi ini, ke depan bisa melahirkan proses transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. “Proses validasi ini kan ketika dijalankan secara manual memerlukan banyak tangan. Nah bagaimana kita di dalam aplikasi ini memberdayakan perangkat desa untuk lebih efisien melakukan validasi,” terang Isman.

Sementara itu, ihwal layanan tematik BUMDes, Isman menjelaskan proses pembentukannya berasal dari replikasi inovasi BUMDesku di Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar dan inovasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Pusat Litbang Inovasi Daerah lantas melakukan

penyempurnaan dengan mengembangkan varian usaha lebih luas. Ke depan ditargetkan hasil pertanian desa dapat diberdayakan di layanan BUMDes, terutama dalam hal pemasarannya. Ikhtiar tersebut nantinya diharapkan bisa mendorong lahirnya investasi. Berkaitan pengembangan layanan tematik tersebut, Puslitbang Inovasi Daerah menindaklanjutinya dengan menggelar Rapat Perumusan Model Inovasi Daerah, di Aula Badan Litbang Kemendagri, Kamis (20/5/2021).

Isman menargetkan di tahun 2021 ini Puslitbang Inovasi Daerah dapat melakukan proses memorandum of understanding (MOU) terhadap 20 pemerintah daerah. Setelahnya kemudian dilanjutkan dengan proses bimbingan teknis. Dirinya berharap berbagai ikhtiar inovasi tersebut nantinya dapat memicu peningkatan daya saing pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

• AF

# MEMACU INOVASI DAERAH HINGGA MENDORONG REFORMASI BIROKRASI

***Berbagai Pemerintah Daerah mengaku memperoleh dampak positif selama mereplikasi layanan aplikasi Puja Indah. Dampak positif itu ditandai dengan semakin mudahnya daerah memberikan layanan kepada masyarakat. Daerah kini jadi lebih akrab dengan inovasi.***

**M**etri Wilda Nasution, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Pasaman, masih mengingat jelas perjumpaan awalnya dengan aplikasi Puja Indah tahun 2019 lalu. Saat itu, ia dan segenap perangkat daerah Kabupaten Pasaman memperoleh sosialisasi inovasi daerah dari Badan Litbang Kemendagri. Hadir dalam acara tersebut sekaligus menyampaikan materi, Kepala Pusat Litbang (Puslitbang) Inovasi Daerah Kemendagri Safrizal.

Dalam sesi paparannya kepada perangkat daerah Kabupaten Pasaman, Safrizal mengenalkan aplikasi Puja Indah. Namun di saat tersebut, aplikasi di Puja Indah baru tersedia versi 1. Dengan kata lain, secara penggunaan dan kinerja masih dijumpai keterbatasan. Kendati demikian, inovasi aplikasi Puja Indah telah membuat perangkat daerah Kabupaten Pasaman tertarik mereplikasi. Apalagi Puja Indah diyakini dapat membuka peluang terbukanya inovasi yang dapat menunjang terciptanya terobosan kebijakan.

Seminggu setelah itu, Kabupaten Pasaman menggelar pembekalan khusus bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Puslitbang Inovasi Daerah, Isman. Langkah ini diambil guna memahami penggunaan dari aplikasi Puja Indah. Pasca dilakukan pembekalan tersebut, selang beberapa bulan setelahnya, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) dengan Badan Litbang Kemendagri. MoU ini dimaksudkan sebagai komitmen bersama untuk menjalankan inovasi, utamanya dalam menerapkan aplikasi Puja Indah di Kabupaten Pasaman.

Pasca penandatanganan MOU, Kabupaten Pasaman melaksanakan workshop mengenai detail layanan di Puja Indah. Pemberian materi workshop masih mengacu pada Puja Indah versi 1 yang terdiri dari tujuh layanan. Dalam layanan itu, Kabupaten Pasaman telah bersiap untuk mendemonstrasikan kepada pengampu kebijakan. Namun dari semua layanan, bidang kesehatan menjadi yang paling dikedepankan.

Pada tahun 2020, perkembangan aplikasi Puja Indah di Kabupaten Pasaman sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Hingga, kondisi itu berbalik di tahun 2021, di mana sosialisasi bimbingan teknis (Bimtek) Puja Indah kembali digelar. Hadirnya Puja Indah di tahun ini juga ditunjang dengan pemutakhiran dan pengembangan menjadi versi 2. Selain itu, layanan di dalamnya juga ditambah menjadi 13 layanan pemerintahan dan satu layanan tematik, yaitu E-Ternak.

Wilda mengatakan dengan penerapan berbagai layanan itu, pihaknya tak ragu mereplikasi semua layanan yang tersedia. Namun, karena pengembangan layanan dilakukan bertahap, ia memilih menunggu untuk penyempurnaan layanan. "Iya seperti layanan tematik E-Ternak, karena masih dalam proses, kami juga menunggu," katanya ketika diwawancarai, Selasa (20/4/2021).

Menurut Wilda, hadirnya aplikasi Puja Indah telah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Pasaman. Ia menuturkan, sebelumnya

Kabupaten Pasaman belum terlalu dikenal dalam skala nasional. Padahal di kawasan tersebut dijumpai beragam potensi wisata, juga berbagai kemajuan di dalamnya. Dengan adanya Puja Indah diharapkan Kabupaten Pasaman bisa dikenal lebih luas lagi.

Wilda menambahkan kendati telah mendorong Kabupaten Pasaman dikenal publik, misi utama dalam menerapkan Puja Indah sejatinya adalah untuk menunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di fasilitas kesehatan. Hadirnya aplikasi Puja Indah telah memudahkan masyarakat dalam mengetahui kondisi terkini di bidang kesehatan. “Kalau selama ini kan masyarakat sulit mencari informasi di layanan kesehatan. Nah dengan Puja Indah sekarang bisa membantu mendapatkan informasi, entah di rumah sakit maupun di puskesmas,” jelasnya.

Wilda menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Badan Litbang Kemendagri. Menurutnya, berkat dikenalkan kepada Puja Indah serta pendampingan secara masif sejak tahun 2019, kemajuan Kabupaten Pasaman semakin pesat. Puncaknya pada gelaran Innovative Government Award (IGA) tahun 2020 lalu. Kabupaten Pasaman meraih penghargaan sebagai Daerah Paling Inovatif dengan menduduki peringkat 23 di seluruh Indonesia. Padahal, di tahun sebelumnya posisinya berada dalam daerah kurang inovatif dengan skor sebanyak 300 poin. “Dengan adanya Puja Indah ini kami semakin terpacu untuk meningkatkan inovasi. Karena selama ini inovasi belum menjadi konsentrasi utama kami. Dan perlahan pendampingan Badan Litbang Kemendagri telah mengubah mindset kami bahwa inovasi itu penting untuk meningkatkan pelayanan,” tutur Wilda.

Ihwal pelaksanaan teknis aplikasi

Puja Indah 2, Wilda mengungkapkan saat ini segenap perangkat daerah di Kabupaten Pasaman tengah mempersiapkan diri. Aspek pertama yang disiapkan adalah administrasi. Nantinya para perangkat daerah yang ditunjuk sebagai super admin dan admin akan memperoleh coaching. Kemudian dipersiapkan aspek legalitas hukumnya, yaitu dengan diberikan SK oleh Bupati Pasaman. Dengan legalitas ini, para perangkat daerah dituntut bertanggung jawab mengenai kelangsungan layanan berdasarkan tugas pokok masing-masing.

Selain itu, para perangkat daerah juga dibekali workshop dan coaching selama empat hari, yakni tanggal 26-29 April 2021. Hal ini terkait pemahaman awal mengenai bagaimana pengenalan data, pembuatan akun, serta pemaparan layanan. Sedangkan pada tahapan workshop tingkat akhir pada akhir Mei 2021 mendatang, direncanakan akan mengundang Badan Litbang Kemendagri. “Kemudian pada Juli nanti, kami rencanakan untuk meluncurkan Puja Indah versi 2 ini,” tambahnya.

Mengenai aplikasi Puja Indah versi 2, Wilda melihat telah dilakukan perbaikan komprehensif dibandingkan Puja Indah versi 1. Saat ini, kata Wilda, penggunaannya jauh lebih mudah (user friendly). Apalagi ditambah dengan pemberian layanan penanggap. Artinya, kini setiap keluhan terkait layanan di dalamnya bisa direspons langsung oleh operator atau admin.

Ia berharap layanan dalam Puja Indah bisa ditambah lagi. Terutama, dalam hal pertanian dan perikanan. Mengingat di Kabupaten Pasaman merupakan sentra penghasil padi dan perikanan yang melimpah. Di samping itu, kawasan tersebut juga ditunjang dengan berbagai potensi wisata, di antaranya pemandangan perbukitan, hutan, serta letak Kabupaten Pas-

aman yang berada pada garis equator. Selain itu, Wilda juga mengaku terbantu dengan layanan tematik E-Ternak. Sebab, Kabupaten Pasaman dinilai memiliki potensi besar dalam bidang peternakan. “Kita harapkan nanti Badan Litbang Kemendagri terus meningkatkan inovasi dan layanan di Puja Indah. Karena bagaimanapun berkat Puja Indah, Kabupaten Pasaman sangat terbantu terutama dalam ranah promosi,” jelas Wilda.

### **Menunjang Percepatan Reformasi Birokrasi**

Penerapan aplikasi Puja Indah di daerah lainnya juga menghasilkan kinerja optimal. Selain dari sisi layanan publik, inovasi dengan aplikasi Puja Indah turut mendorong percepatan reformasi birokrasi. Hal tersebutlah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. Menurut Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Syah Putra Abdullah, lahirnya Puja Indah memicu implementasi E-Government.

Langkah itu terlihat manakala diperlukan integrasi dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Atas landasan tersebut, guna menerapkan aplikasi Puja Indah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu membentuk tim penerapan implementasi replikasi inovasi daerah. Kemudian melalui percobaan aplikasi Puja Indah, dihasilkan kesimpulan jika Kabupaten Labuhanbatu membutuhkan aplikasi satu sistem yang terintegrasi. Berdasarkan ikhtiar tersebut, terciptalah aplikasi E-APBD SIANDI, yaitu Sistem Informasi Anggaran Daerah Integrasi. “Semangat membuat inovasi ini awalnya dari penerapan Puja Indah di kabupaten kami,” terang Putra melalui sambungan suara, Selasa (13/4/2021).

Tak hanya itu, dampak lain pener-



*Pemerintah Kabupaten Pasaman menyelenggarakan Bimtek Puja Indah secara virtual di kantor Pemkab Pasaman, yang dilaksanakan pada tanggal 26-29 April 2021.*

apan layanan aplikasi Puja Indah di Kabupaten Labuhanbatu tercermin dari terciptanya aplikasi E-Kinerja. Aplikasi ini digunakan untuk memantau, melaporkan, sekaligus sebagai bentuk transparansi kinerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sebelum dibentuknya aplikasi ini, kata Putra, absensi dan pelaporan kinerja berlangsung secara manual. Sehingga sulit untuk diawasi. “Penerapan Puja Indah ini juga mendorong kesadaran kami untuk menerapkan sistem pemerintahan ber-

basis elektronik (SPBE),” kata Putra menambahkan.

Menurut Putra, sebagian layanan di Puja Indah mendorong naiknya skor evaluasi SPBE. Ini dikarenakan setiap perangkat daerah dituntut untuk mengimplementasikan SPBE. Sehingga ikhtiar tersebut juga menunjang peningkatan skor IGA. Di mana di tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu berada di peringkat 35 daerah paling inovatif se-Indonesia. “Selain itu kami juga berada di posisi pertama di Provinsi Sumatera Utara. Dengan

kategori kabupaten paling inovatif,” jelasnya.

Berkaitan dengan hasil tersebut, Puja Indah memicu Kabupaten Labuhanbatu dikenal lebih luas. Dalam kurun tertentu, berbagai daerah melakukan kunjungan kerja dan studi banding. Seperti dari Pemkab Padang Lawas, Pemkab Karo, Pemkab Dairi, dan Pemkot Bukittinggi. Secara tidak langsung potensi wisata juga turut terangkat. Hal ini diyakini bisa mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.





Dalam mereplikasi Puja Indah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu saat ini telah menerapkan layanan pendidikan. Di mana dalam layanan tersebut telah terisi data sebanyak 352 sekolah. Nantinya, proses pemantauan pembelajaran dapat dilaksanakan melalui aplikasi. Hal itu meliputi perekapan rapor siswa secara online, penyediaan e-book, serta adanya e-magazine untuk siswa. Selain itu juga layanan kesehatan, di mana pasien bisa mendaftar via daring. Serta mengetahui informasi kesehatan dari

rumah sakit baik swasta atau milik pemerintah, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Layanan Puja Indah lainnya yang juga direplikasi adalah komoditas. Dengan layanan ini masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu dapat mengetahui perkiraan harga komoditas. “Sehingga ibu-ibu yang mau ke pasar bisa memperkirakan untuk membawa uang berapa,” kata Putra.

Mengenai berbagai penambahan layanan Puja Indah versi 2, Putra mengaku siap menerapkan keseluruhan

layanan. Ikhtiar itu dilakukan guna mewujudkan terobosan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Ia menambahkan keberadaan Puja Indah memiliki misi luhur sesuai dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. “Semoga kami dapat terus bergandengan tangan dengan Badan Litbang Kemendagri dalam melaksanakan layanan Puja Indah. Sehingga reformasi birokrasi dan pelayanan untuk masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya.

• AF

# 14 LAYANAN PUJA INDAH



Aplikasi Layanan Perizinan



Aplikasi Layanan Kesehatan



Aplikasi Layanan Pendidikan



Aplikasi Layanan Komoditas



Aplikasi Layanan Ketenagakerjaan



Aplikasi Layanan Kependudukan



Aplikasi Layanan Aspirasi DPRD



Aplikasi Layanan Trantibum Linmas



Aplikasi Layanan Sosial



Aplikasi Layanan Pariwisata



Aplikasi Layanan Pekerjaan Umum



Aplikasi Layanan Perhubungan



Aplikasi Administrasi Pemerintahan



e-Ternak



# PUJA INDAH DAPAT DIGUNAKAN OLEH DAERAH UNTUK MEMPERCEPAT 14 JENIS LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Puja Indah merupakan Aplikasi Layanan Pemerintahan berbasis data input yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mempercepat layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform layanan.

- 2017 : 1 Aplikasi Layanan  
Layanan Perizinan (G2G, belum terintegrasi)
- 2018 : Penambahan 7 Aplikasi Layanan
  1. Layanan Kesehatan
  2. Layanan Pendidikan
  3. Layanan Komoditas
  4. Layanan Aspirasi
  5. Layanan Ketenagakerjaan
  6. Layanan Update Data Kependudukan
- 2019 : Penambahan 6 Aplikasi Layanan
  1. Layanan Perhubungan
  2. Layanan Sosial
  3. Layanan Pekerjaan Umum
  4. Layanan Adm. Pemerintahan (G2G)
  5. Layanan Tranfibumlinmas
  6. Layanan Pariwisata
- 2021 : Penambahan 1 Aplikasi Layanan Tematik  
E-Ternak



... lensa matra





*Simulasi belajar tatap muka yang dilaksanakan pada SDN 03 Manggarai , Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (07/04/2021) Foto: Ari Wibisono*

# Menjalani Berbagai Peran Untuk Harmonisasi

## Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA

Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tempat Tanggal Lahir

Blitar, 7 November 1958

### Pendidikan

S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Jember (UNEJ).

S2 Ilmu Politik The Flinders University, Adelaide, Australia.

S3 Ilmu Politik Curtin University, Perth, Australia.



Senyum di wajah Siti Zuhro perlahan mengembang ketika ingatannya tentang masa kuliah menyuarak. Sejenak, dengan sikap tenang, dirinya mulai membuka cerita ihwal perjalanannya menjadi peneliti di bidang politik. Perempuan kelahiran Blitar itu mengisahkan, sejak awal tak mengira akan menekuni kajian tersebut. Lantaran saat berkuliah di Universitas Negeri Jember, fokus konsentrasinya adalah hubungan internasional. “Obsesi saya tadinya ingin menjadi diplomat,” katanya ketika dihubungi pada Selasa, 13 April lalu, “namun dalam perjalanannya saya belajar tentang politik internasional.”

Siti Zuhro menambahkan karier yang dijalani saat ini tidak lepas dari sikap yang dia terapkan sejak masa silam. Sebelum menjalani profesi sebagai peneliti, dirinya menekankan agar tidak muluk-muluk dalam melaksanakan prinsip hidup. Baginya, setiap peluang dan kesempatan yang diperoleh perlu dijalani dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya

secara *all-out*.

Sikap demikian juga telah diterapkan Siti Zuhro pada masa awal memilih Perguruan Tinggi. Saat itu ia tidak memperoleh izin dari orang tuanya untuk menempuh studi di Fakultas Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB). Padahal, sejak Sekolah Menengah Atas (SMA), Siti Zuhro telah intens menekuni dunia sains. Dengan alasan tersebut, dirinya kemudian memilih mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Negeri Jember. Dengan pertimbangan, beban pembelajaran di lingkup keilmuan sosial tidak terlalu berat. Sehingga, dirinya bisa lekas menyelesaikan pendidikan di kampus, kemudian meneruskan karier sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Namun ternyata bayangan tersebut meleset. Pada jurusan yang dipilih, Siti Zuhro justru dituntut memahami aspek dunia internasional lebih luas. Lantaran itu, ia semakin nyaman dengan dunia intelektual. “Jalan hidup yang saya ambil sebetulnya sangat sederhana. Sehingga itu kemudian menuntun saya mendapatkan keco-

cokan menjadi intelektual,” terangnya.

Ketekunan Siti Zuhro dalam mempelajari Hubungan Internasional mendorongnya intens mengkaji dunia mancanegara. Terhitung, ibu satu anak itu telah menekuni berbagai tema luar negeri, mulai dari organisasi internasional, perbandingan politik, dunia ketiga, hingga permasalahan yang terjadi di berbagai benua. Konsentrasi di keilmuan tersebut juga membuatnya memiliki pemahaman holistik. Sebab itulah, Siti Zuhro membuat karya tulis tentang kebijakan politik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam reunifikasi Taiwan, termasuk bagaimana peranan negara lain seperti Amerika di pusaran konflik tersebut. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam kajian itu menarik untuk dibahas.

Seakan tak puas, dirinya melanjutkan pembahasan mengenai kebijakan luar negeri ketika berada di jenjang S2, di The Flinders University, Adelaide, Australia. Dalam tesisnya, ia mengkaji perbandingan pemerintahan di

Menjalani profesi sebagai seorang peneliti, membuat Prof. Dr. R. Siti Zuhro (62) kian akrab dengan aktivitas membaca dan menulis. Baginya pekerjaan tersebut bisa dilakukan siapa saja, tak terkecuali perempuan. Dirinya mengaku senang melakoni karir tersebut, sebab semakin menunjang wawasan dan pengetahuannya di bidang politik. Kini di sela-sela kesibukannya, perempuan bungsu dari 12 bersaudara itu berikhtiar terus produktif menebarkan keilmuannya.

Thailand dan Indonesia. Kedua negara tersebut, jelas Siti Zuhro, memiliki banyak persamaan. Baik dari bentuk negaranya yang kesatuan, pengaruh militer yang penting, hingga bentuk birokrasinya. Hanya saja di Thailand kerap dijumpai kudeta pemerintahan oleh militer. Sedangkan di Indonesia, permasalahan tersebut tidak terjadi. “Jadi menarik mengkaji dua negara yang memiliki kemiripan-kemiripan seperti Thailand. Sehingga di S2 tesis saya mengenai perjuangan demokrasi di Thailand,” terangnya.

Sementara itu pada jenjang studi S3, Siti Zuhro lebih fokus pada kajian birokrasi dan otonomi daerah di Indonesia. Konsentrasi keilmuan tersebut mengacu pada latar belakangnya yang selama ini diemban sejak di S1, S2, hingga ketika menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Siti Zuhro berhasil memperoleh gelar Ph.D setelah mempertahankan disertasinya yang menyebut gerakan reformasi tahun 1998 memungkinkan diterapkannya demokrasi.

Dirinya mengungkapkan, pada masa kurang dari lima tahun pasca-reformasi, euforia demokrasi di Indonesia berada di tingkatan tinggi. Namun semangat tersebut ketika tidak diiringi dengan ikhtiar untuk memutus mata rantai budaya lama seperti patronasi, patrimonialisme, budaya feodalisme, maka akan menimbulkan hybrid sistem. Dengan kata lain, kebijakan tersebut dapat bercampur dan mengakibatkan pelaksanaan demokrasi tidak bisa berjalan secara optimal.

Menurut Siti Zuhro, mempelajari topik kajian ilmu sosial bukanlah sebuah proses sederhana. Pasalnya dalam mempelajari ilmu sosial, kita tidak dapat melakukan akselerasi layaknya ilmu eksak. Sehingga diperlukan tahapan panjang, terutama agar dapat memahami berbagai aspek dan dimensi lain yang lebih luas. “Di ilmu sosial kita perlu banyak membaca, memahami, dan banyak perjalanan. Dan di situlah saya menjalani proses *learning by doing*,” terangnya.

### Tekuni Dunia Intelektual

Siti Zuhro sadar, karier yang ditempuh sejauh ini berakar dari kegigihannya dalam berusaha. Dalam memulai bekerja sebagai peneliti, alih-alih meminta bantuan pada relasi, dirinya kukuh dengan keyakinan diri sendiri. Persiapan yang matang dan usaha di atas rata-rata menebalkan kegigihannya dalam mencapai posisinya yang sekarang. Proses tersebut jugalah yang membuat dirinya semakin bersemangat dalam mengembangkan keilmuannya.

Perempuan kelahiran Blitar ini memiliki minat yang besar pada kajian ilmu politik, khususnya demokrasi, otonomi daerah, birokrasi dan pemilu/pilkada serta kebangsaan. Tak heran, ketertarikan itu mendorongnya terus aktif menulis. Sampai sekarang, sebanyak 23 karya buku telah dihasilkannya baik dalam kapasitasnya sebagai editor, maupun penulis. Teranyar, dua karya berjudul Model Desentralisasi

Asimetris dalam NKRI, serta Aktor dibalik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus Bali dan Maluku Utara telah berhasil dipublikasikan. Keduanya diterbitkan Penerbit Obor tahun 2020 lalu. Selain itu, dia juga aktif menulis di majalah, koran, serta jurnal. Kecintaannya pada dunia intelektual juga begitu besar. Karenanya, dirinya kerap diundang berbagai media, baik televisi maupun radio, untuk menyampaikan pandangannya terhadap isu sosial.

Sebagai seorang peneliti, ia merasa bahagia ketika dapat berbagi ilmu dan pengetahuan terhadap sesama. Dirinya berkeyakinan amal ilmiah dan ilmu amaliah harus terus disebar. Sebab, kedua hal tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat. Lantaran intens menjalani karier di dunia intelektual, Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI tersebut didapuk sebagai ketua II Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Tak tanggung-tanggung, berkat kesungguhannya menggeluti bidang tersebut dirinya mendapatkan dua kali penghargaan dari Presiden, masing-masing Satyalancana Karya Satya X tahun 1999, dan XX di tahun 2009.

Baginya pekerjaan sebagai seorang peneliti dapat dilakukan siapa saja, tak terkecuali perempuan. Apalagi, dalam pandangan Siti Zuhro, aktivitas meneliti membutuhkan konsentrasi yang tinggi mengenai isu yang dikaji. Hal itu, diyakininya relevan dengan perempuan. Sebab, menurutnya para perempuan mampu mendalami sebuah topik dengan tekun dan teliti.

Dalam menunjang pekerjaannya, Siti Zuhro menilai aktivitas membaca dan menulis memiliki peran yang vital. Sebab itulah, dalam menjalankan keduanya tidak bisa dilakukan main-main. Alasannya, ketika pendalaman membaca tidak digalakkan secara optimal, secara tidak langsung tulisan yang dihasilkan juga tidak terfokus dan komprehensif. Sebaliknya, semakin rinci informasi yang dibaca,

seorang peneliti akan menghasilkan karya yang bermutu. “Oleh karena itu perlu bacaan banyak dulu, *note taking*, *pointers*, baru menulis,” katanya.

### Membagi Peran di Keluarga

Kesibukannya sebagai peneliti tidak serta merta menjadikannya terfokus melalui pada karier. Guna menjaga kehidupan tetap seimbang, Siti Zuhro dalam keseharian membagi peranannya di keluarga, baik sebagai peneliti, pengajar, seorang ibu, maupun istri. Hal itu dilakukannya dengan disiplin tinggi dan hati-hati. Bahkan, tak jarang jika di salah satu perannya tersebut dirasa kurang maksimal, dirinya meminta bantuan

asistennya.

Meski saat ini dalam situasi yang diliputi pandemi Covid-19, Siti Zuhro mengaku tidak terbebani. Hal itu karena dirinya dapat membagi tugas dan tanggung jawab selama di rumah. Bahkan saat ini pada kondisi lingkungan yang menerapkan new normal, dirinya mengaku lebih produktif. Dengan kemajuan teknologi, berbagai aktivitas seperti mengajar, meneliti, hingga memberi materi dapat dilakukannya secara virtual dari rumah. Sehingga alokasi waktu dan jarak yang biasanya menghabiskan porsi lebih banyak, dapat dipangkas lebih singkat. Karena hal itu juga, dirinya menjadi lebih dekat dengan keluarga.

Dalam pandangan Siti Zuhro, keluarga menempati peranan yang penting. Karenanya dirinya perlu membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya ketika memperoleh izin dari sang suami untuk meniti karier, Siti Zuhro menjawabnya dengan berbagai torehan prestasi. Tak hanya itu, dia juga kerap memperoleh pujian dari kolega dan rekan kerja. Bahkan

tak jarang, hal tersebut tidak langsung diutarakan padanya, melainkan kepada sang suami. “Kadang ada beberapa kolega dan kepala daerah bilang langsung ke suami saya “terima kasih karena kami telah dipintarkan ibu”. Hal itu membuat saya merasa ini luar biasa. Berarti saya secara tidak langsung telah menjalankan amanah keluarga dengan bagus,” katanya.

Menurut Siti Zuhro, di dalam lingkup keluarga penting bagi berbagai pihak untuk dapat menempatkan posisi sebagaimana mestinya. Dia mencontohkan, sebagai istri ketika hendak menjalankan kegiatan tertentu perlu membutuhkan izin sang suami. Sebab, suami memiliki status sebagai imam sekaligus kepala keluarga. Sedangkan, istri juga memiliki hak untuk dinafkahi suami. Dirinya menambahkan, kunci untuk merawat agar keluarga berjalan harmonis bertumpu pada sikap saling menghormati. Dengan itu, kedua belah pihak dapat tumbuh bersama. “Inilah resep mengapa kita perlu menjaga keseimbangan harmonisasi di keluarga. Baik sebagai perempuan karier, intelektual, maupun istri di dalam keluarga,” pungkasnya.

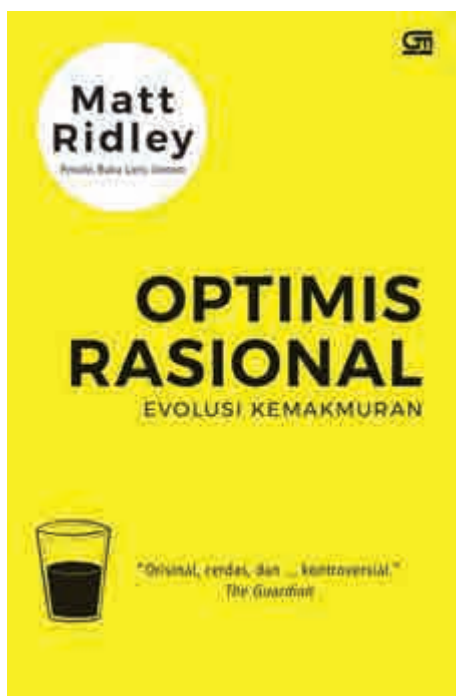
• AF







# OPTIMIS NAMUN TETAP HATI-HATI MENGHADAPI MASA DEPAN



## Optimis Rasional: Evolusi Kemakmuran

**Penulis :** Matt Ridley

**Penerjemah :** Zia Anshor

**Penerbit :**

Gramedia Pustaka Utama

**Tahun Terbit :** 2020

**Jumlah halaman :**

xxii + 434 halaman

**ISBN :** 978-602-06-4725-8

**Oleh :** Hari Taqwan Santoso

**K**ita hidup di zaman modern. Suatu zaman di mana kemakmuran manusia menyapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada suatu titik di masa lampau, manusia telah menemukan kerja sama dan pertukaran yang lambat laun berevolusi menjadi perdagangan. Perdagangan inilah yang menjadi sumber kemakmuran.

Dulu pada zaman batu, seorang manusia membuat alat bantu berburu sederhana kapak genggam dengan keterampilannya sendiri. Para ahli menemukan bahwa bentuk kapak genggam tidak berubah selama beberapa ribu tahun. Tidak ada kemajuan tercipta. Sekarang, situasinya jauh berbeda dengan ditemukannya kerja sama atau “pembagian kerja”. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dengan kemampuannya sendiri dapat membuat, misalnya, sebuah mouse. Tentu ada orang yang bisa merencangkannya, ada pula orang yang bisa menemukan bahan-bahannya. Akan tetapi, orang yang bisa merancang itu tidak bisa menyediakan bahan dan sebaliknya. Si perancang mustahil bisa mengebor bumi sekadar demi mendapatkan beberapa potong logam serta setakar minyak bumi untuk dijadikan plastik (plastik dan logam adalah bahan-bahan untuk mouse) (hlm. xvii).

Semakin intens perdagangan antar individu atau kelompok manusia, semakin makmur kehidupan mereka. Kita tidak perlu menjadi pembuat komputer untuk bisa memiliki dan menggunakannya, sehingga membuat pekerjaan kita lebih efisien. Begitu juga, kita tidak perlu menjadi pembuat kendaraan bermotor untuk bisa memiliki serta menggunakannya, yang membuat perjalanan kita jauh lebih hemat waktu.

Namun kemakmuran itu seperti bumerang. Kita menikmatinya dengan mengeruk sumber-sumber alam yang pada gilirannya membawa dampak negatif. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan dampak tersebut. Jutaan ton gas CO<sub>2</sub> yang kita lepas ke atmosfer melalui pembangkit listrik, asap pabrik, dan kendaraan bermotor, mengundang efek rumah kaca. Hujan asam pun mengancam, ketika dengan aktifitas-aktifitas yang masif, kita melepas gas-gas serupa ke udara. Lapisan ozon, yang melindungi kita dari radiasi kosmis yang berbahaya, menipis. Masih banyak lagi efek samping negatif bagi kemakmuran yang kita nikmati dalam jangka yang relatif pendek.

Menyadari hal ini, sebagian orang berupaya keras untuk membagikan kesadaran itu pada orang-orang lain dengan menyuarakannya. Orang-orang tersebutlah yang

dengan getol mengangkat isu-isu seperti kerusakan lingkungan, pemanasan global, kelaparan dan pandemi ke publik. Mereka cenderung pesimis dalam menghadapi masa depan. Di sisi lain, Matt Ridley dalam bukunya *Optimis Rasional: Evolusi Kemakmuran* ini mendukung posisi sebaliknya. Dia tidak menolak efek-efek samping tersebut, namun jelas bersikap optimis dalam menghadapinya. Dia menunjukkan bahwa, tidak hanya dewasa ini, beberapa puluh tahun lalu ada orang-orang yang mempunyai ketakutan serupa, dengan masalah berbeda, dan ternyata mereka salah.

*Alasan yang sedang terkenal untuk pesimisme selalu berubah, tapi pesimisnya selalu ada. Pada 1960-an, yang paling dikhawatirkan adalah ledakan penduduk dan kelaparan global; pada 1970-an habisnya sumber daya; pada 1980-an hujan asam; pada 1990-an wabah; pada 2000-an pemanasan global. Satu demi satu yang dikhawatirkan datang dan (kecuali yang terakhir) pergi. Apa kita sekadar beruntung? Apa kita, seperti lelucon lama, orang yang jatuh melewati lantai pertama pencakar langit dan berpikir "sejauh ini baik-baik saja"? Ataukah yang tak realistis itu pesimisme?*

Saya ingin membuat pengakuan dulu: para pesimis benar ketika mereka berkata bahwa jika berlanjut sebagaimana adanya sekarang, dunia akan berakhir dengan bencana bagi segenap umat manusia. Jika semua transportasi bergantung kepada minyak dan minyak habis, maka transportasi akan berhenti. Jika agrikultur terus bergantung pada air dan air tanah habis, maka kelaparan akan terjadi. Namun perhatikan kata "jika". Dunia tidak akan berlanjut sebagaimana adanya. Itu intinya kemajuan manusia, pesan utama evolusi budaya, seluruh maksud perubahan dinamis

argumen buku ini. (hlm. 287)

Ridley kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa bahaya yang sebenarnya datang dari perlambatan perubahan. Umat manusia telah menjadi mesin pemecah masalah kolektif dan memecahkan masalah dengan mengubah cara. Caranya dengan ciptaan yang sering didorong pasar: kelangkaan menaikkan harga yang pada gilirannya mendorong pengembangan alternatif dan efisiensi. Kesalahan para pesimis, menurut Ridley, ada dalam ekstrapolasionisme mereka, yaitu menganggap masa depan adalah sekadar masa lalu versi yang lebih besar.

Penuturan Ridley yang ringan dan gampang dicerna dalam buku tersebut memang membesarkan hati. Akan tetapi, karena hanya semangat optimismenya yang digaungkan secara eksplisit, sementara sisi rasional dari optimisme itu kurang ditekankan, pembaca awan dapat menyalah-pahami uraian Ridley. Adalah fakta bahwa aktivitas manusia yang masif saat ini telah memengaruhi alam, dan berpotensi mengundang bencana (beberapa bahkan sudah terjadi). Dalam buku tersebut, peringatan Ridley kurang kuat, bahwa sejauh apa pun peradaban manusia maju dan berkembang, alam tetap memiliki batasan yang tidak bisa dilanggar. Manusia yang bijak seharusnya menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pesan ini muncul di beberapa bagian dalam buku, namun tetap kurang terasa sehingga dikhawatirkan bahwa buku ini akan dijadikan pembenaran bagi mereka yang menikmati kemakmuran jangka pendek dengan seenak perutnya menjarah alam dan mengabaikan akibat-akibatnya.

Matt Ridley (Foto: Google)



R E S E N S I F I L M

# THE WHITE TIGER

*Diadaptasi dari novel dengan judul serupa karya Aravind Adiga, Sutradara Ramin Bahrani mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda India dalam merubah nasibnya. Meraih beragam penghargaan, termasuk menjadi nominasi Oscar untuk kategori skenario adaptasi terbaik.*





Sungai keruh nan hitam dan penuh sampah. Disekelilingnya masyarakat berkerumun untuk melakukan beragam aktivitas seperti mencuci dan mandi. Rumah-rumah tampak berimpitan dengan jalan berpasir tanpa aspal. Masyarakat disana seakan-akan acuh mengenai laku hidup bersih. Itulah secuil gambaran Desa Laxmangarh, sebuah kawasan kumuh di India tempat Balram Halwai (Adarsh Gourav) berasal. Halwai disematkan pada nama belakangnya, karena Balram berasal dari kasta rendah di India. Di desa itu Balram tinggal bersama bersama dengan nenek, ayah, dan para saudaranya dalam satu rumah kecil. Tentu saja terasa sesak, ditambah hewan ternaknya yang juga ikut memadati dalam satu atap.

Sejak belia Balram memiliki kecerdasan yang menonjol dibanding anak lain di desanya. Dirinya gemar membaca dan menguasai bahasa Inggris dengan baik. Namun sudah menjadi tuntutan hidup disana, bila anak kecil dipaksa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Balram menjalani tuntutan itu dengan bekerja menjadi pelayan di kedai teh. Kehidupan menjadi semakin rumit, karena masyarakat di sana wajib mem-

## The White Tiger

**Sutradara:** Ramin Bahrani

**Skenario :** Ramin Bahrani

**Pemain :** Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra, Vedant Sinha, Kamlesh Gill, Sandeep Singh, Young Kisha, Tilak Raj, Harshit Mahawar, dll

bayar sepertiga dari penghasilannya kepada Mukesh sang tuan tanah (Mahesh Manjrekar). Ayah Balram yang hanya seorang buruh pun, kesulitan membayarnya. Hingga suatu ketika ayahnya mengidap penyakit TBC (Tuberkulosis). Dengan pola hidup yang tidak higienis ditambah tidak tersedianya sarana kesehatan yang memadai, ayah Balram pun meninggal karenanya. Salah satu kejadian yang membuat Balram sangat terpukul. Ia lantas bertekad ingin keluar dari kemalangan nasib yang seakan-akan sudah menjadi takdir di kampungnya. Terlebih Balram dan keluarganya berasal dari kasta rendah yang menjadi afirmasi bahwa takdirnya menjadi golongan kelas bawah yang tertindas. "Semua kehidupan di sini seperti berada di kandang ayam, mereka tahu mereka hanya menunggu giliran untuk disembelih, namun tidak berontak dan tidak berusaha kabur dari kandang". Sebuah alegori yang dipakai Balram untuk menggambarkan kondisi sosial kaumnya kala itu.

Tekad Balram untuk keluar dari jerat kemiskinan menemui titik terang ketika ia memutuskan untuk melamar menjadi supir dari

Ashok (Rajkummar Rao) putra dari Mukesh sang tuan tanah. Berkat wataknya yang pantang menyerah, Balram berhasil meyakinkan Mukesh dan Ashok untuk menerimanya sebagai supir. Namun seperti tradisi di India yang diceritakan dalam film, segala informasi mengenai keluarga Balram dicari tahu. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya pelayan yang mencuri harta dari majikannya sekaligus cara agar pelayan mereka dapat patuh. Syahdan, Mulailah Balram menjalani kehidupan barunya bersama dengan Ashok dan istrinya Pinky (Priyanka Chopra). Tidak seperti ayahnya, Ashok dan Pinky adalah sosok yang baik hati, egaliter, berwawasan luas, dan menentang kesenjangan kelas yang terjadi. Watak yang



membuat Balram semakin termotivasi untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Berharap dapat keluar dari kedudukan sosial yang ditakdirkan kastanya, dan menjadi seperti seorang Ashok kelak.

Sepanjang film kita akan disuguhkan berbagai kisah Balram menjadi seorang supir. Kelucuan terjadi ketika Balram seorang pemuda dari desa yang kagum dengan gemerlapnya kota metropolitan saat diajak mengunjungi Delhi. Saat-saat bersama Ashok dan Pinky juga begitu dinikmati oleh Balram. Ia menjadi seorang supir yang jujur dan melayani dengan baik. Terlebih saat Pinky memberikan nasihat bahwa dirinya tidak boleh terkungkung selamanya menjadi seorang pelayan. Dirinya diminta untuk bersekolah dan melanjutkan hidup yang lebih baik. Namun konflik mulai hadir ketika film berada pada pertengahan babak. Saat itu Ashok dan Pinky sedang mabuk karena pulang pesta, Balram seperti biasa mengantarkannya pulang. Namun di tengah perjalanan, Pinky memaksa Balram agar dirinya yang menyetir pada malam itu. Namun

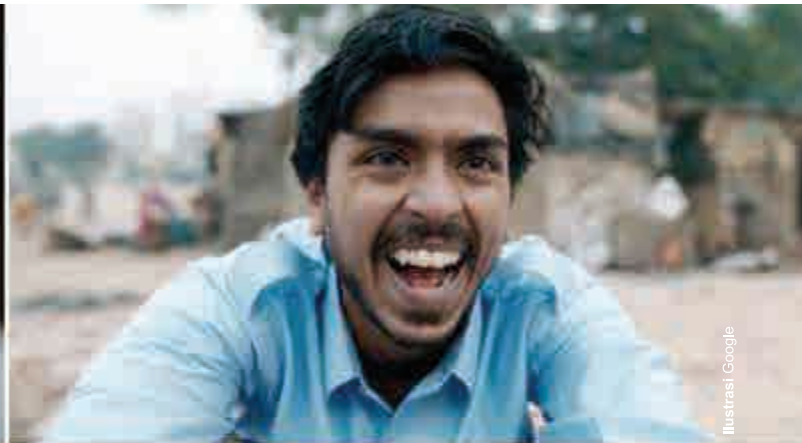
nahas, pinky yang saat itu sedang mabuk menabrak seorang anak kecil hingga tewas. Alih-alih bertanggung jawab, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya tergeletak di jalanan.

Kejadian ini lantas menambah eskalasi tempo dari film. Balram dipaksa mengakui bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka malam itu. Ayah Ashok membawa pengacara dan memaksa dirinya membuat pengakuan secara legal. Balram menerima dengan berat hati namun tidak melawan. Seketika dirinya, kecewa terhadap majikannya termasuk dengan Ashok. Dirinya kembali sadar bahwa takdirnya bukanlah selamanya menjadi pelayan dan terus tertindas. Ia memulai cara untuk keluar dari sangkarnya dan mulai berpikir curang untuk mengakali tuannya. Dia berpikir tuannyalah yang telah berhutang budi dengannya. Sehingga tak mengapa dia mencurinya. Masalah kembali rumit ketika ponakannya dari kampung datang untuk menjemputnya pulang untuk dipaksa menikah oleh neneknya. Sebuah tradisi yang sangat ia benci. Na-

mun tekadnya sudah bulat, ia tetap ingin melampaui batas kedudukan sosialnya sebagai seorang terpendang. Meskipun melalui cara paling keji yang ia harus lakukan.

Semua alur cerita dalam film berjalan mundur. Plot juga diceritakan melalui sudut pandang Balram ketika sudah sukses menjadi saudagar teknologi transportasi. Film ini akan kembali mengingatkan kita dengan *Slumdog Millionaire* sebuah film fenomenal peraih penghargaan Oscar yang memiliki gaya penceritaan dan pengangkatan tema yang sama. Balram sukses menjadi tokoh antagonis sekaligus protagonis yang memantik empati pun emosi. Penggambaran lanskap India dengan sinematografi indah dan otentik menjadi nilai lebih yang membuat kita betah menyaksikan sinema dengan durasi 2 jam lebih itu. Kalian bisa menyaksikan film *The White Tiger* di platform Netflix.

• Aji



# Strategi Hijau di Daerah Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19



**Joko Tri Haryanto**  
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan

Seluruh pihak sepakat bahwa bencana pandemi Covid-19 telah menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pukulan yang begitu hebat sangat terasa di sektor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Turunnya mobilitas dan melemahnya aktivitas ekonomi jelas akan berpengaruh munculnya potensi kelesuan ekonomi. Berkurangnya kegiatan produksi dan konsumsi sekaligus mobilitas masyarakat, juga memiliki pengaruh terhadap kelompok masyarakat rentan, baik yang bekerja secara formal terikat kontrak resmi perusahaan maupun pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian sebagai sumber pemasukan. Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sendiri telah mengindikasikan besaran jumlah pekerja yang dirumahkan dalam angka yang relatif signifikan. Dalam jangka panjang, tanpa adanya intervensi yang komprehensif dari pemerintah, bukan tidak mungkin angka-angka ini akan terus bertambah secara drastis.

Di sisi lain, perubahan pola kegiatan masyarakat, pembatasan sosial, dan pelemahan ekonomi juga mempengaruhi konsumsi energi. Pertamina telah melaporkan adanya tren penurunan penjualan BBM dimulai di triwulan pertama tahun 2020 yang lalu. Konsumsi listrik rumah tangga juga mengalami pergeseran ketika konsumsi listrik di golongan rumah tangga R-3/6.600 VA naik sementara konsumsi listrik di sektor bisnis dan industri justru menurun. Penurunan ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada rencana penyediaan energi Indonesia termasuk target pemanfaatan energi terbarukan di Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan pencapaian target bauran energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).



Tak heran jika pemerintah kemudian merespon dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases-2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu dimaksud mengamatkan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam perjalanannya, Perppu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Sebagai implementasi UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah menyusun beberapa kebijakan dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan menyasar pemulihan dari sisi *demand* dan sisi *supply* dunia usaha. Dari aspek *demand*, kebijakan akan fokus kepada upaya menjaga konsumsi, mendukung dunia usaha sekaligus mempertahankan investasi dan kegiatan ekspor impor. Dalam upaya menjaga konsumsi, pemerintah mengalokasikan belanja hingga mencapai total Rp405,1 triliun dengan rincian kegiatan berupa subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan melalui tambahan sembako, kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, tambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) serta bansos Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek.

Untuk mendukung dunia usaha sekaligus mempertahankan investasi,

pemerintah memberikan stimulus berupa penyertaan modal negara untuk PNM, UMi dan Mekaar, subsidi bunga ultra mikro dan UMKM, pelonggaran syarat kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai serta dana kompensasi kepada BUMN. Terkait kegiatan ekspor impor, beberapa kebijakan yang dipilih diantaranya pemberian insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai, penyederhanaan & pengurangan jumlah Larangan & pembatasan (Lartas) ekspor impor, percepatan proses ekspor-impor untuk *reputable trader* serta peningkatan & percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui *national logistic ecosystem* (NLE).

Dalam kebijakan di bidang keuangan daerah, program PEN juga menyasar pemda yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan *refocusing* kegiatan, re-alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai yang diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu. Terdapat pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) kepada penduduk miskin di Desa yang juga terdampak Covid-19, dimana aturan teknisnya menggunakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermendesPDTT) nomor 6 tahun 2020 yang merevisi aturan sebelumnya.

Dari aspek *supply*, beberapa program yang menyasar diantaranya program subsidi bunga ultra mikro dan UMKM sebesar Rp. 34,15 triliun untuk relaksasi selama 6 bulan. Berikutnya adalah pola penempatan dana untuk mendukung restrukturisasi dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat dan transparan. Relaksasi skema penjaminan diberikan melalui penjaminan kredit modal kerja kepa-

da UMKM baik secara langsung oleh pemerintah atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Bentuk insentif lainnya diberikan melalui sektor perpajakan dengan penerapan beberapa model stimulus diantaranya: PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% serta pengembalian pendahuluan PPN dengan total Rp123,01 triliun.

Penyelamatan beberapa BUMN terdampak menjadi prioritas PEN berikutnya. Beberapa kriteria BUMN terdampak berdasar indikator pengaruhnya terhadap hajat hidup masyarakat, peran *sovereign* yang dijalankannya, eksposur terhadap sistem keuangan, kepemilikan pemerintah dan total asset yang dimiliki. Berdasar kriteria-kriteria ini, deretan BUMN yang mendapat prioritas antara lain PLN, Bulog, Garuda, Kereta Api, Perkebunan Nusantara, Bahan, PNM, Krakatau Steel, Perumnas, Pertamina dan ITDC.

### **PEN dan Strategi Hijau Pemulihan di Daerah**

Program PEN itu sendiri perlu dipahami sebagai sebuah mekanisme insentif yang bersifat cepat dan sementara. Untuk rencana pemulihan ekonomi jangka panjang, pemerintah Indonesia tentunya memiliki kesempatan untuk merancang strategi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan hijau (*green growth*) sebagai implementasi *green stimulus recovery*. *Green stimulus recovery* ini dianggap merupakan pendekatan terbaik bagi negara dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan yang mengejar aspek pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Sesuai dengan skenario *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) yang disampaikan oleh Bappenas tahun 2019, proyeksi rata-rata



pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% sampai dengan tahun 2024 jika di dorong dari area pertumbuhan hijau (*green growth*).

Dengan mempertimbangkan pembangunan rendah karbon dan pemanfaatan energi terbarukan, strategi pemulihan ekonomi yang tepat juga akan berkontribusi pada target RUEN dan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang telah menjadi komitmen Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). Survei yang dilakukan oleh Universitas Oxford dengan sampel kalangan perbankan, Menkeu negara G20, dan akademisi di 53 negara menemukan bahwa stimulus hijau (*green stimulus*) lebih dipilih sebagai strategi untuk mengatasi dampak pandemi dalam jangka panjang.

Studi ini juga membandingkan stimulus hijau (*green stimulus*) dan stimulus tradisional dengan hasil banyak proyek stimulus hijau menyerap

tenaga kerja lebih banyak, memberikan imbal investasi jangka pendek yang lebih besar sekaligus penghematan biaya jangka panjang. Karenanya, strategi stimulus yang fokus pada aspek pertumbuhan hijau diyakini menjadi opsi terbaik bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca bencana. Sebuah strategi yang bukan hanya fokus kepada pertumbuhan namun juga berkelanjutan dan inklusif dalam pelaksanaannya.

Menjadi menarik jika strategi ini kemudian difokuskan kepada percepatan *recovery* di daerah khususnya yang mengalami dampak bencana pandemi paling signifikan seperti Bali. Dengan menempatkan sektor pariwisata sebagai satu satunya mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah, Bali tercatat menjadi salah satu daerah terdampak pandemi sangat berat. Pertumbuhan ekonomi daerah terjun bebas dan pemutusan hubungan kerja terjadi secara merata di hampir seluruh sektor. Bali yang bi-

asanya selalu terjaga hampir 24 jam, sekarang berubah menjadi lengang dan berkurang aktivitas ekonominya.

Dengan koordinasi seluruh pihak termasuk dukungan tanpa henti dari Pemerintah Pusat, secara perlahan Bali mulai menata hidupnya kembali. Berbekal sertifikasi CHSE (*Cleanless, Healty, Safety dan Environment Sustainability*), pariwisata Bali yakin untuk bangkit yang pertama. Syaratnya jelas menempatkan isu strategi hijau dalam pengembangan pariwisata di masa kenormalan baru. Pariwisata di masa kenormalan baru akan mengubah format pariwisata lama yang mengandalkan kunjungan dalam kapasitas massal. Yang ada ke depannya adalah jenis pariwisata yang mengandalkan *quality tourism*, mengutamakan aspek *experiential searching* sebagai tren utama pariwisata. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan memang dipercaya menjadi solusi permasalahan bencana pandemi ke depannya.



# Covid-19 dan Kesehatan Fiskal Daerah



**Anselmus Tan**

Dosen Fakultas Manajemen Pemerintahan  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Foto Freepik

**W**abah Covid-19 telah mengancam kesehatan fiskal daerah. Ancaman nyata berupa menurunnya realisasi pendapatan daerah, sehingga terhambat arus kas daerah dan tertunda sebagian belanja prioritas daerah. Terjadilah defisit anggaran berjalan (*current budget deficit*) tahun 2020. Inilah fenomena global yang dihadapi pemerintah daerah (pemda). Hasil survei UCLG di 22 negara yang dipublikasikan dalam artikel “*The Impact of the Covid-19 Pandemic on Sub-national Finances*” (2021: 2) menyimpulkan bahwa wabah Covid-19 berdampak pada rerata penurunan 10% pendapatan daerah dan peningkatan 5% belanja daerah.

Khusus di Indonesia, penurunan pendapatan daerah terutama karena menurunnya pendapatan asli daerah (PAD). Rasio penurunan tertinggi pada penerimaan pajak daerah tidak langsung (seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan) yang dipungut dari pelaku usaha lokal (*local business taxes*), karena pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik. Rasio penurunan pajak daerah langsung (seperti pajak bumi dan bangunan) juga cukup tinggi, karena menurunnya kemampuan membayar oleh wajib pajak daerah. Alokasi dana transfer juga menurun, karena pendapatan negara menurun. Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menetapkan kebijakan penurunan alokasi dana transfer. Inilah penyebab defisit anggaran berjalan tahun 2020 pada semua daerah.

Defisit anggaran berjalan mencerminkan kendala anggaran daerah, yakni ketidakmampuan membiayai sebagian belanja prioritas daerah. Menurut Rodden, Eskeland, & Litvack dalam buku “*Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints*” (2003: 4), bila kendala anggaran berat, pemda melakukan pinjaman, dan bila kendala ang-

garan ringan, pemda berharap dana transfer. Solusinya, menyesuaikan kebutuhan belanja daerah dengan potensi realisasi pendapatan daerah, melalui revisi APBD. Sebagai contoh, Pemda Provinsi DKI Jakarta harus merevisi APBD Tahun 2020, dari semula Rp.87,956 triliun menjadi Rp.63,303 triliun (turun 28,03%), karena menurun 33,83% PAD dan 11,57% dana transfer (Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020).

### Revisi APBD

Di tengah ketidakpastian titik akhir wabah Covid-19 dan titik awal pemulihan ekonomi nasional, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 akan cenderung menurun. Ada tiga faktor penyebab. Pertama, menurunnya pendapatan masyarakat, mengakibatkan menurunnya kemampuan membayar pajak daerah langsung. Kedua, pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik, mengakibatkan terbatasnya aktivitas ekonomi pelaku usaha lokal sebagai obyek pajak daerah tidak langsung. Ketiga, belum stabilnya pendapatan negara, mengakibatkan menurunnya alokasi dana transfer, yang telah ditetapkan dalam Permenkeu Nomor 17 Tahun 2021, seperti penurunan 3,20% DAU dan 0,61% DAK. Implikasinya, semua daerah harus merevisi APBD Tahun 2021.

Dalam merevisi APBD, diutamakan postur anggaran berimbang (bisa anggaran defisit bila ada dana cadangan), dengan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah. Menurut Honadle, Costa, & Cigler dalam buku "*Fiscal Health for Local Governments*" (2004: 18), kesehatan fiskal daerah adalah suatu keadaan dimana pendapatan daerah melebihi belanja wajib daerah, sehingga mampu membiayai belanja prioritas daerah untuk penyediaan barang dan jasa publik.

### Kesehatan Fiskal Daerah

Untuk menjaga kesehatan fiskal daerah (KFD) dalam merevisi APBD, perlu diprediksi kendala anggaran daerah (KAD) pada postur APBD Tahun 2021, melalui analisis dua parameter, yakni otonomi fiskal daerah (*local fiscal autonomy*) dan ruang fiskal daerah (*local fiscal space*). Untuk itu, perlu dipahami prinsip desentralisasi fiskal tentang diskresi pemda menggunakan pendapatan daerah dan mengalokasikan belanja daerah. Secara akademik, ada tiga jenis pendapatan daerah: (1) PAD, merupakan diskresi pemda; (2) dana transfer, berupa dana transfer umum (DTU), yang sebagian tanpa diskresi pemda untuk belanja wajib daerah, dan dana transfer khusus (DTK), yang tanpa diskresi pemda; dan (3) dana hibah bantuan, yang tanpa diskresi pemda (Beer-Tóth, 2009: 244). Ada dua jenis belanja daerah: (1) belanja wajib daerah (BWD), yang tanpa diskresi pemda untuk menguranginya; dan (2) belanja prioritas daerah (BPD), menjadi diskresi pemda untuk menguranginya (Honadle, Costa, & Cigler, 2004: 18-58).

Menurut Enid Slack dalam artikel "*How Much Local Fiscal Autonomy Do Cities Have? A Comparison Eight Cities around the World*" (2017: 1), otonomi fiskal daerah adalah sejauh mana pemda mengandalkan PAD untuk membiayai belanja daerah. Namun, menurut Beer-Tóth dalam buku "*Local Financial Autonomy in Theory and Practice*" (2009: 120), konsep otonomi fiskal daerah sama dengan otonomi penerimaan daerah (*local revenue autonomy*). Rasio otonomi fiskal daerah (ROFD) diperoleh dari total PAD (TPAD) dibagi total pendapatan daerah (TPD). Rumusnya:  $ROFD = TPAD / TPD$ . ROFD mencerminkan tingkat kemandirian pemda dalam membiayai belanja daerah.

Sedangkan ruang fiskal daerah adalah suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas pemda dalam mengalokasikan pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan prioritas daerah (Kementerian Keuangan, 2014: 34). Menurut Uchimura & Suzuki dalam artikel "*Measuring Fiscal Decentralization in the Philippines*" (2009: 9), konsep ruang fiskal daerah sama dengan diskresi pengeluaran daerah (*local expenditure discretion*). Untuk mengetahui ruang fiskal daerah, harus dihitung jumlah penerimaan umum daerah (*local general revenues*), yakni TPD dikurangi pendapatan daerah tanpa diskresi pemda (PDTDP) dan BWD. Rasio ruang fiskal daerah (RRFD) diperoleh dari jumlah penerimaan umum daerah dibagi TPD. Rumusnya:  $RRFD = \{(TPD) - (PDTDP + BWD)\} / TPD$ . RRFD mencerminkan tingkat diskresi pemda dalam membiayai BPD.

Ada enam aksioma dari hasil analisis dua parameter tersebut: (1) bila ROFD sangat rendah (40% ke bawah), maka dana transfer sangat tinggi; (2) bila ROFD rendah (41%-50%), maka dana transfer tinggi; (3) bila ROFD tinggi (51%-70%), maka dana transfer rendah; (4) bila ROFD sangat tinggi (71% ke atas), maka dana transfer sangat rendah; (5) RRFD lebih tinggi dari ROFD, bila DTU lebih tinggi dari BWD; dan (6) RRFD lebih rendah dari ROFD, bila DTU lebih rendah dari BWD.

Berbasis aksioma tersebut, dapat diprediksi KAD dalam merevisi APBD Tahun 2021, dalam empat kluster daerah, yakni: (1) daerah pada aksioma satu dan lima, akan tinggi KAD (banyak berkurang BPD), karena diskresi pemda membiayai BPD sangat tergantung dari DTU; (2) daerah pada aksioma dua dan lima, akan cukup tinggi KAD (cukup banyak berkurang BPD), karena diskresi

pemda membiayai BPD tergantung dari DTU; (3) daerah pada aksioma tiga dan lima, akan rendah KAD (sedikit berkurang BPD), karena diskresi pemda membiayai BPD bersumber dari PAD dan DTU; dan (4) daerah pada aksioma empat dan enam (seperti DKI Jakarta), sangat rendah KAD (sangat sedikit berkurang BPD), karena diskresi pemda membiayai BPD bersumber dari PAD.

Bagi daerah pada kluster-1 dan kluster-2, untuk menjaga KFD dalam postur APBD Perubahan Tahun 2021, harus dianalisis secara cermat kebu-

tuhan belanja daerah yang sebenarnya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil analisis potensi realisasi pendapatan daerah. Analisis potensi realisasi pendapatan daerah mencakupi tiga sumber pendapatan daerah (PAD, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah). Kecermatan analisis akan tampak pada kecilnya selisih antara target dan realisasi pendapatan daerah. Analisis kebutuhan belanja daerah difokuskan pada tiga aspek, yakni menetapkan BWD (pegawai; bunga; dan pemulihan ekonomi daerah); mengurangi BPD yang belum urgen; dan menetapkan

BPD (barang; jasa; modal; subsidi; hibah; bantuan sosial; dan transfer). Penetapan kebutuhan belanja daerah harus sepadan dengan potensi realisasi pendapatan daerah, agar APBD Perubahan Tahun 2021 berpostur anggaran berimbang.

Secara umum, untuk menjaga KFD dan mencegah KAD, sangat tergantung dari kejagan PAD dan DTU. Diharapkan, Permenkeu Nomor 17 Tahun 2021 menjadi kebijakan terakhir dalam pengurangan DTU tahun 2021.





## Menjaga Lambung

# Tetap Aman dengan Pisang

**B**agi penderita maag dan asam lambung, menjalani aktivitas ibadah puasa barangkali menjadi tantangan tersendiri. Selain dituntut agar tetap konsisten menahan hawa nafsu berupa lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, di sisi lain juga perlu mempertimbangkan aspek kesehatan pencernaan. Tidak semua makanan bisa menunjang aktivitas berpuasa. Bahkan, jika keliru dalam mengonsumsi makanan tertentu, justru dapat melahirkan aneka penyakit penyerta lainnya.

Karena itu, selektif dalam memilih makanan yang tepat menjadi kunci agar terhindar dari masalah maag dan asam lambung. Melansir situs [www.halodoc.com](http://www.halodoc.com), dalam menjaga pola makan ketika berpuasa, kita perlu memperhatikan komposisi kandungan karbohidrat dan protein bagi tubuh. Hal itu penting dalam menjaga kebugaran kesehatan pencernaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengonsumsi buah-buahan dapat menunjang tubuh agar tetap prima. Salah satunya adalah buah pisang. Seperti diketahui,

pisang merupakan buah yang tidak memiliki lemak, kolesterol, dan sodium. Namun, buah berwarna kuning ini kaya akan vitamin C, B6, asam folat, fosfor, mangan, kalsium, dan magnesium. Dengan kandungan tersebut, pisang mampu menjaga pencernaan tetap merasa kenyang. Di samping juga menjaga berat badan tetap stabil, sebab di dalam buah pisang kandungan lemaknya cukup kecil atau nyaris tidak ada.

Mengutip Healthline, di dalam buah pisang terdapat pektin, yaitu serat yang berbentuk menyerupai spon. Di dalamnya juga terdiri atas pati resisten yang berfungsi seperti serat larut. Dengan kandungan tersebut, pisang mampu mengontrol gula darah agar tidak meningkat setelah makan. Di samping itu, buah pisang mampu memperlambat pengosongan lambung, sehingga dalam menjalankan aktivitas puasa pencernaan tidak mudah merasa lapar. Kendati mempunyai kadar manfaat yang melimpah, namun bagi penderita diabetes tipe dua disarankan agar berhati-hati. Sebab, di dalam buah pisang matang terdapat kadar gula cukup tinggi.

Studi *Journal of Physiology and Biokimia* mengatakan pisang mengandung banyak *fructooligosaccha-*

*rides*. Zat ini merupakan karbohidrat nondigestif yang menjadikan probiotik meningkat. Dengan hal itu, di saat yang sama tubuh terdorong untuk menyerap kalsium. Memakan buah pisang di sisi lain bermanfaat bagi kesehatan usus. Hal itu dikarenakan serat yang terdapat dalam pisang mendorong usus terlindungi. Sekaligus menjaga bakteri baik tetap optimal. Karena hal itu, sangat disarankan bagi kita yang berpuasa agar mengonsumsi pisang.

Patrick Takahashi, Ahli Gastroenterologi dari St. Vincent Medical Center menyebutkan mengonsumsi pisang baik bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit asam lambung. Kandungan asam yang rendah di dalam buah pisang, membuat lambung tetap merasa aman. Hal itu dikarenakan asam rendah memicu makanan cepat dicerna oleh lambung. Seperti diketahui, lambannya lambung dalam mencerna makanan menghasilkan asam lambung. “Pisang umumnya bersifat basa,” jelas Takahashi melansir *Everyday Health* dengan mengatakan kandungan lainnya. “Zat tersebut baik untuk menjaga kesehatan jantung sekaligus tulang,” pungkasnya.

# BERWISATA KE LUAR ANGKASA BUKAN LAGI MIMPI

**K**emajuan teknologi semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Tak hanya seputar kebutuhan sehari-hari, bahkan pada bidang yang dianggap mustahil, kini dengan kemajuan sains segalanya menjadi mungkin. Baru-baru ini, perusahaan Virgin Galactic dan Blue Origin membantu orang-orang dalam melaksanakan impiannya berwisata ke luar angkasa. Melansir CNN Indonesia, kedua perusahaan tersebut saat ini tengah membangun wahana di luar angkasa.

Seperti diketahui Virgin Galactic pada tahun ini melakukan debutnya di bawah nama SPCE. Sedangkan Blue Origin merupakan perusahaan ruang angkasa yang didanai oleh pendiri Amazon Jeff Bezos. Kendati melakukan inovasi dalam menjangkau orang-orang berwisata ke luar angkasa, kedua perusahaan tersebut memiliki perbedaan secara teknis dalam pelaksanaannya.

Media CNBC melaporkan, pesawat milik Virgin Galactic bernama SpaceShipTwo mampu membawa hingga delapan orang dalam suatu penerbangan. Nantinya, dalam lawatan ke luar angkasa, pesawat tersebut akan menggunakan tenaga jet yang dinamai WhiteKnightTwo. Ketika membawa penumpang terbang, WhiteKnightTwo akan melakukan lepas landas dan naik ke ketinggian lebih dari 40.000 kaki. Setelahnya pesawat tersebut akan mampu melaju pada ketinggian 295.000 kaki atau sekitar 90 kilometer.

Dengan SpaceShipTwo, penumpang akan menghabiskan beberapa menit mengambang dalam gaya berat



mikro. Untuk melakukan lawatan ini, Virgin Galactic mematok tarif sekitar US\$200-US\$250 ribu atau sekitar Rp2,8 miliar hingga Rp3,6 miliar. Saat ini tercatat, perusahaan tersebut telah menjualkan tiketnya ke sekitar 600 penumpang. Hingga tulisan ini diberitakan, Virgin Galactic telah menerbangkan sebanyak lima orang, yang masing-masing merupakan karyawan perusahaan melalui dua kali uji coba.

Di tahun 2021 ini, Virgin Galactic direncanakan akan melakukan dua uji coba penerbangan lagi. Hal itu menyusul rencana dimulainya layanan komersial, sekaligus upaya menerbangkan sang pemilik, Richard Branson. Sementara itu, mengenai perusahaan Blue Origin, direncanakan akan melaju dengan dua kapsul roket bernama New Shepard. Nantinya, bagian atas roket akan berpisah ketika berada di ketinggian lebih dari 330 ribu kaki. Kemudian

kapsul mengapung beberapa menit dalam gaya berat mikro sebelum kembali ke Bumi dengan menggunakan sistem parasut.

Sampai sejauh ini, belum diketahui kisaran harga untuk merasakan pengalaman luar biasa dengan Blue Origin. Juga, perusahaan tersebut masih memerlukan tiga atau empat penerbangan uji coba, sebelum mulai mengangkut orang di dalamnya. Dari kedua perusahaan tersebut, penumpang memerlukan rentang waktu berbeda dalam latihan pra-keberangkatan. Virgin Galactic membutuhkan waktu selama tiga hari. Sementara, bagi penumpang di Blue Origin memerlukan satu hari untuk latihan. Untuk diketahui, kedua perusahaan tersebut menggagas inovasi tersebut, guna memberikan sensasi tak terlupakan bagi orang berpenghasilan tinggi.

(Diolah dari berbagai sumber.)

# Doa Kecil Yang Tidak Terkabul

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Soleh sangatlah saleh. Dari setiap dosa, kecil maupun besar, kepalanya menoleh. Dari setiap perbuatan yang tidak diperbolehkan agama, dia berpaling. Jangankan melakukan dosa-dosa besar seperti membunuh orang, berzina atau meminum minuman keras, dia bahkan anti terhadap dosa sekecil ghibah, yaitu membicarakan aib orang lain sedemikian rupa sehingga orang itu akan sakit hati mendengarnya.

“Ghibah itu dosanya kecil,” kata Soleh dengan yakin, suatu ketika. “Tapi karena kita terlalu terbiasa sampai merasa tidak punya beban ketika melakukannya, maka ia dapat dengan mudah menjadi dosa besar. Itulah kenapa ada ungkapan yang menyatakan bahwa dosa ghibah melebihi dosa zina. Ghibah juga bisa disamakan dengan makan bangkai saudara kita sendiri. Terlebih lagi, dosa orang yang men-ghibah dan yang mendengarkan itu sama. Makanya lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan, meski sekadar untuk mendengarkan.”

Ketika berkumpul dengan orang-orang, saat arah pembicaraan mulai menuju pada gunjingan-gunjingan atas kejelekan orang lain, Soleh akan segera menunjukkan wajah tidak berkenan dan undur diri dengan halus. Alasannya selalu sama, yaitu pamit ke toilet dan baru kembali setelah agak lama. Terkadang dia pergi cukup lama sampai orang-orang yang ditinggalkannya bertanya-tanya, kemana dia gerangan. Sekali waktu, ada juga yang dengan lancang menuduhnya tidak luwes dalam bergaul lantaran alasannya pergi ke toilet itu jelas mengada-ada. Demikianlah komentar mereka yang tidak tahu banyak soal agama. Tapi bagi yang tahu, pasti memahami dan memaklumi tingkah

Soleh itu.

Kesalahan Soleh tidak hanya terletak dalam tindakannya menghindari berbagai dosa, tapi juga dalam kegemarannya beribadah, mendekati diri kepada Tuhannya. Soleh sangat rajin salat. Di mana pun dia berada dan sesibuk apa pun kegiatannya, dia selalu berusaha agar dirinya salat berjamaah. Jika waktunya lapang, dia akan berangkat ke masjid paling awal dan pulang paling akhir, ini karena dia tidak hanya melakukan salat wajib, tetapi dia menambahi salat itu dengan berbagai salat sunnah dan doa-doa panjang meminta keselamatan diri dan keluarganya di dunia dan di akhirat. Soleh dengan sepenuh hati ingin menjadi orang yang menggantungkan hatinya di masjid karena menurut hadits, salah satu di antara tujuh golongan yang kelak mendapat naungan menyejukan pada hari kiamat sementara yang lain kepanasan, adalah orang-orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Artinya, mereka yang banyak-banyak meluangkan waktunya untuk beribadah di masjid.

Hampir setiap malam, tidak peduli jam berapa pun Soleh tidur, dia bangun dini hari untuk melaksanakan salat tahajjud. Menurut riwayat, doa-doa yang dipanjatkan setelah selesai melakukan salat tahajjud di sepertiga malam itu mustajab, cepat sekali dikabulkan oleh Allah. Di antara semua ibadah sunnah, dia sangat menyukai yang satu ini, tidak wajib dilakukan tapi besar manfaatnya secara spiritual. Meski begitu, oleh karena Soleh telah dapat mensyukuri segala hal dalam hidupnya, dia tidak punya banyak permintaan untuk dirinya sendiri. Dia lebih banyak meminta untuk orang lain, misalnya supaya kakeknya yang sangat ingin berhaji tapi terhalang biaya itu bisa



terwujud dan benar-benar berangkat ke Mekkah. Selain keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, untuk dirinya sendiri Soleh hanya meminta satu, yaitu dia ingin agar hatinya diberi ketetapan iman, tidak berpaling dari Allah dan lantas menjadi kafir. Bahkan untuk hal ini pun, seperti halnya dia tidak perlu berdoa. Tapi siapa yang tahu pasti? Ada banyak kisah para ahli ibadah di masa lampau yang di akhir hidupnya tergelincir ke jurang dosa dan mati dalam keadaan kafir. Soleh sangat takut jika hal itu terjadi padanya.

Ketika usianya telah matang untuk menikah, Soleh sudah punya target. Dia mengidam-idamkan Rufaidah sejak lama, sejak mereka berdua duduk di kelas yang sama di SMA dulu. Kebetulan, mereka kuliah di kampus yang sama, hal ini memungkinkan keduanya untuk tetap saling berkomunikasi. Namun karena mereka mengambil jurusan yang berbeda, keduanya tidak sering bertemu. “Tidak apa lah. Toh banyak bertemu juga berarti potensi berbuat dosanya lebih besar. Asal masih tetap saling bertukar kabar saja,” katanya pada diri sendiri.

Rufaidah adalah sosok yang sempurna di mata Soleh. Parasnya memang cantik, tapi apa yang membuat Soleh benar-benar tertarik padanya adalah bahwa tingkat kereligiusan mereka setara. Rufaidah juga gemar beribadah, rajin salat dan puasa sunnah, sama seperti dirinya. Gadis itu tidak kaya, tapi berasal dari keluarga baik-baik yang kesemua anggotanya punya pengetahuan mendalam tentang agama.

Sebenarnya Soleh punya banyak saingan, tidak hanya satu dua laki-laki yang mencoba mendekati Rufaidah, tapi belasan. Untungnya, gadis itu punya prinsip yang dia pegang teguh, yaitu bahwa dirinya tidak mau berpacaran. Dia hanya mau menanggapi ajakan menikah, itu pun selepas kuliah. Oleh karena itu mereka yang ingin sekadar main-main pada akhirnya harus gugur di tengah jalan dan menelan pil kegagalan yang pahit. Kenyataan ini membuat Soleh tersenyum. Dia tidak perlu repot-repot bersaing dengan mereka. Dia hanya butuh kesabaran, dan itu sudah tertanam kuat dalam dirinya bersama akhlak-akhlak mulia yang lain. Jika upaya mendapatkan hati Rufaidah dianggap sebagai perlombaan, Soleh yakin bahwa dirinya akan menjadi juara satu, bahkan sejak dia mulai di garis start. Dia yakin dirinya akan keluar sebagai pemenang yang mengangkut satu-satunya trofi dan tidak menyisakan apa pun untuk para pesaingnya.

Untuk menambah rasa yakin itu selama setahun terakhir Soleh telah menambah doanya seusai salat tahajjud, sebuah

doa yang dipanjatkan pada Allah demi dirinya sendiri. Dia meminta Rufaidah. Setiap malam, selepas salat tahajjud, dia memohon agar gadis itu disandingkan dengannya dalam bingkai pernikahan yang indah dan bahagia. “Dengan demikian, ya Tuhan-ku, aku akan lebih bersemangat dalam beribadah kepada-Mu,” katanya mengakhiri doa yang dia panjatkan tanpa putus itu.

Namun malang bagi Soleh, ketika dia menyatakan ‘hasrat suci’-nya pada Rufaidah, gadis pujaannya itu menolak halus. Terlebih, dia menolak dengan alasan yang tidak bisa dipahami Soleh. “Kamu terlalu baik untukku, Mas. Jodohmu pastilah gadis yang jauh lebih religius daripada aku, bukan aku.”

Soleh amat terkejut dengan jawaban itu. “Tapi aku yakin jodohku itu ya kamu, Dik,” dia berupaya meyakinkan. Rufaidah tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Dan, berapa kali pun Soleh berusaha, jawaban gadis itu tetap sama. Rufaidah tetap menolak. Terlihat jelas bahwa dia tidak akan mengubah pilihan itu meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Barangkali meski menolak, Rufaidah ingin tetap menjaga perasaan Soleh.

Penolakan ini membuat Soleh kecewa berat. Bagaimana mungkin doa-doa yang dia panjatkan setiap malam tanpa putus itu tidak berhasil menundukkan hati Rufaidah? Yang lebih menyayat lagi, calon suami pilihan Rufaidah adalah Rojim, seorang lelaki bejat yang terkenal suka meniduri para perempuan tanpa mau bertanggungjawab. Mereka akhirnya menikah, dan tampaknya hidup bahagia. Sekarang pasangan itu sudah dikaruniai dua orang anak.

“Apakah Rufaidah buta, atau dia terlalu bodoh sampai tidak tahu kelakukan si setan Rojim itu!?” keluh Soleh sambil mengelus-elus dadanya sendiri di kamar. Matanya menerawang ke langit-langit. Hatinya sakit.

Kata Tuhan, orang baik haruslah berjodoh dengan orang baik. Orang saleh seperti dirinya haruslah berjodoh dengan orang saleh juga, seperti Rufaidah. Sementara tukang zina yang bejat seperti Rojim, jodohnya haruslah tukang zina juga, bukan Rufaidah. “Enak sekali, Rojim yang pendosa, dapat Rufaidah yang perempuan salehah! Tidak bisa begini. Ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur’an,” Soleh mengumpat-umpat sendirian.

Rojim memang berwatak durjana dan tidak sealim dirinya, tapi untuk urusan menaklukkan hati perempuan dia nomor satu. Rojim pandai berpura-pura menjadi orang baik dan memberikan perhatian-perhatian kecil yang membuatnya mampu menyusup jauh ke dalam hati perempuan



yang hendak ditaklukkannya. Soleh tidak mengenal teknik pendekatan seperti itu. Sebenarnya dia menyadari ini, tapi dia terlampau percaya pada kekuatan doanya. Dia percaya, Tuhan akan membantunya dan menghalangi Rojim dan orang-orang seperti itu dari mendapatkan Rufaidah yang taat beragama. Karena hal ini, Soleh bahkan tidak pernah mempertimbangkan Rojim sebagai saingan. Ternyata, yang terjadi justru jauh di luar prediksinya. Soleh sangat terpukul.

Soleh berpikir, bertanya-tanya sendirian, berpikir, lalu bertanya-tanya sendirian lagi sampai dia mulai menarik kesimpulan bahwa seluruh ibadahnya sia-sia belaka. Seharusnya Allah mengabulkan doanya untuk mendapatkan Rufaidah. Sebab dengan begitu dia bisa lebih bersemangat dalam beribadah, toh permintaan itu sangat masuk akal dan sudah sesuai dengan apa yang Dia ucapkan dalam kitab suci-Nya. Gampang sekali bagi Dia untuk mengabulkan doa itu. Ketidak-terkabulan ini sungguh tidak masuk akal!

“Apakah aku salah berdoa supaya Rufaidah menjadi istriku?” tanya Soleh dalam hati. Dia lalu mencoba menjawab pertanyaan itu dengan kata ‘barangkali’. Istri adalah perkara duniawi. Dan meskipun berdoa meminta perkara duniawi itu tidak dilarang, tapi masih kurang tepat dari sudut pandang orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Ibadah seharusnya dilakukan secara tulus, tidak pamrih, semata-mata karena kita diciptakan untuk itu sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, jika doan-

ya tidak terkabul mungkin itu karena Tuhan berharap dia beribadah dengan lebih tulus.

Namun sejurus kemudian Soleh teringat pada doanya untuk sang kakek. Kakeknya itu masih saja di rumah sambil berharap bisa sampai ke Tanah Suci seperti pungguk yang merindukan bulan karena faktanya dia memang tidak punya biaya. Ingatan itu membuat Soleh merasa kepalanya seperti dibenturkan. Rasa-rasanya, berdoa supaya kakeknya mampu berhaji itu bukan permintaan hal duniawi, tapi kenyataannya sampai sekarang itu juga tidak terkabul.

Soleh terus berpikir dan bertanya sendirian. Pikirannya menjadi liar, dan mengarah pada kesimpulan-kesimpulan fatal. Misalnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat. “Katanya Mahakuasa dan Mahaadil. Tapi perang terus saja terjadi di dunia, kelaparan dan wabah membuat orang-orang di satu belahan dunia menderita sementara di belahan dunia yang lain orang-orang hidup nyaman dalam kemewahan yang merusak alam. Ada di mana Allah?”

Bersamaan dengan itu, perlahan-lahan keimanan meninggalkan hatinya. Semenjak ditolak Rufaidah, dia tidak lagi melakukan ibadah-ibadah *sunnah*. Malas! Ketika dia sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat, ibadah wajib seperti puasa dan salat pun ditinggalkannya. Pada akhirnya, dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Soleh sudah tidak saleh, dia bahkan telah menjadi kafir dan tidak peduli lagi. Semua karena doa ‘kecil’-nya yang tidak terkabul.



Foto Freepik



## GANDRUNG TEKNOLOGI

**P**erkembangan teknologi digital saat ini, perlu kita sikapi dengan bijak. Ia mampu membantu mengurus hidup kita jadi lebih ringkas, cepat, dan mudah. Namun teknologi tersebut juga dapat menciptakan segudang masalah sosial. Tentu kita sudah tahu rilisan terbaru Digital Civility Index 2020 yang mengungkap bahwa warganet Indonesia dicap paling tak sopan se-Asia Tenggara. Belum lagi maraknya berita bohong, ujaran kebencian, perundungan, hingga penghasutan berseliweran dalam balutan konten digital. Akibatnya banyak generasi milenial setelahnya yang menderita penyakit mental karena terpapar ekosistem digital yang tidak sehat. Bahkan kanal media sosial seringkali dijadikan sarana bagi teroris untuk menyebarkan paham dan merekrut calon anggota baru. Begitu bermasalahnya perilaku bermedia sosial masyarakat, hingga pemerintah merasa perlu membentuk polisi siber sebagai watchdog. Seolah mengamini segala kondisi tersebut, laporan Digital Competitiveness Index 2020 juga menempatkan Indonesia pada urutan 10 terbawah, dari total 63 negara yang diukur kapasitas dan kesiapan dalam mengadopsi teknologi untuk mendukung ekonomi dan kehidupan sosial.

Namun kita tidak boleh kemudian menjadi alergi terhadap dunia teknologi. Terlebih setahun belakangan sejak pandemi Covid-19 hadir kita tentu makin akrab dengan bermacam acara virtual yang melibatkan gawai. Instansi pemerintah juga semakin gencar menggalakan pelayanan berbasis teknologi. Mungkin hampir tiap perhelatan rapat koordinasi yang saya hadiri, selalu dibarengi dengan peluncuran layanan digital. Biasanya layanan digital tersebut berbentuk aplikasi dengan penamaan akronim yang

“nyeleneh” dan unik. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri juga tidak absen untuk ikut dalam ikhtiar tersebut dengan meluncurkan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Puja indah merupakan aplikasi berbagi pakai yang digunakan untuk memudahkan pemberian layanan bagi masyarakat. Sebuah kebijakan yang bagus untuk merubah citra layanan publik yang kaku, berbelit, dan mahal menjadi lebih inklusif bagi semua. Tak bosan-bosan juga, para pejabat pemerintah menyuarakan soal revolusi industri 4.0, pentingnya big data, dan *artificial intelligence*. Bahkan Presiden Joko Widodo juga pernah melontarkan ide agar kelak robot dapat menggantikan peran dari pegawai negeri sipil. Kabar terbaru, Indonesia bahkan bakal memiliki calon Silicon Valley bernama Bukit Algoritma. Sebuah kawasan yang dirancang sebagai rumah kondusif bagi para penemu di bidang teknologi.

Dengan besarnya ceruk potensi pengembangan teknologi, momentum ini perlu kita manfaatkan sehingga kita dapat memetik dampak baik darinya. Untuk itu masyarakat sudah saatnya meningkatkan literasi digitalnya sehingga lebih dewasa dalam penggunaan teknologi. Pun begitu pemerintah harus terus menempatkan ide pengembangan teknologi dalam ruang dan waktu yang konkrit. Hal ini agar ide tersebut tidak sebatas jadi retorika jargon namun laiah ketika masuk dalam tataran implementasi.

Semoga kegandrungan kita akan teknologi bukan sebatas asmara tanpa tambahan.

• Aji

# call for PAPER

## MATRA PEMBARUAN



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2021, yang akan diterbitkan pada 2 (dua) edisi yaitu Mei dan November.

Registrasi dan submit artikel anda di

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jalan Kramat Raya No.132, Senen, Jakarta Pusat  
0812 8165 6781/Shinta (Whatsapp Only)  
matrapembaruan@gmail.com



- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38000 s.d 40000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah Dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan
- Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.
- Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).
- Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*).

Google Scholar



# CALL FOR PAPER

## JURNAL BINA PRAJA

Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.



### JBP *Journal of Home Affairs Governance*

Its central aim is thereby to enhance the broad scholarly understanding of the range of contemporary political and governing processes, and impact upon of states, political entities, international organizations, communities, societies and individuals, at international, regional, national, local, and village levels.

## April, Agustus & Desember

### TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscript may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscript should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscript have not been published in other media
- Manuscript should have a minimum of 35000-8000 character in Indonesian or English (preferably in English)
- For the writing systematic and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index>
- A minimum of 25 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduated theses, and/or other research report
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.



[jurnal.kemendagri.go.id](http://jurnal.kemendagri.go.id)

For more details | 08812 1941 9885/redaksijbp@gmail.com

INDEXED BY:

